URUNDANA PROJECT



POPULISME KIRI ←

CHANTAL MOUFFE

Alih Bahasa: **Melfin Zaenuri**

Chantal Mouffe

Chantal Mouffe merupakan seorang teoritikus politik asal Belgia dan profesor teori politik di University of Westminster, UK. Mouffe dikenal karena kontribusinya dalam *Essex School of discourse analysis* dengan teorinya tentang demokrasi radikal dan politik agonistik. Bersama suaminya, Ernesto Laclau, Mouffe menulis buku *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Buku *For a Left Populism* ini adalah buku termutakhirnya yang membahas perlunya gerakan kiri, bersama gerakan progresif lainnya, untuk terlibat dalam radikalisasi demokrasi.

CHANTAL MOUFFE

populisme kiri

Alih Bahasa:
Melfin Zaenuri

URUNDANA PROJECT

ANTINOMI
antinomi.org

Populisme Kiri

Chantal Mouffe

Diterjemahkan dari:

For a Left Populism
© Chantal Mouffe 2018
First Published by Verso 2018

Hak terjemahan dalam bahasa Indonesia pada:
Antinomi Institute

Edisi I: Desember 2020 (e-book)

Alih Bahasa: Melfin Zaenuri
Editor: Khoiril Maqin
Tata Letak: Rée
Desain Sampul: Rée

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Penerbit Antinomi
Jl. Kaliurang km 5,3 No. 12 Sleman 55281 Yogyakarta
Email: antinomi.inst@gmail.com
https://antinomi.org

ISBN 978-602-51908-8-9

Buku ini dapat diunduh secara gratis melalui **antinomi.org/publikasi**
dan bebas disebarluaskan untuk kepentingan
diseminasi pemikiran. Dilarang keras menggunakannya
untuk keperluan komersial.

Terima kasih untuk seluruh
donatur yang telah
mendukung terbitnya
terjemahan buku ini.

~

untuk Ernesto

Orang-orang bisa mendapatkan keberuntungan kedua, tetapi mereka tidak bisa menyangkalnya... Mereka bisa melengkungkan bengkokannya, tetapi mereka tidak bisa menghancurkannya. Tentu saja mereka seharusnya tidak pernah menyerah, karena mereka tidak mengetahui akhirnya dan keberuntungan tersebut berjalan dengan cara yang tidak jelas dan tidak diketahui, mereka selalu berharap, dan karena mereka berharap, tidak menyerah dalam segala macam keberuntungan dan penderitaan, mereka mungkin akan menemukan diri mereka sendiri.

~ Niccolò Machiavelli, *Discourses on Livy*

DARI PENERJEMAH

AKHIR-AKHIR ini, ruang publik demokratik kita terkungkung dalam jurang cemoohan dan celaan—demonisasi—terhadap orang-orang atau kelompok yang disinyalir antidemokratik. Mereka ialah orang-orang atau kelompok yang mengglorifikasi politik identitas dan menggemakan sentimen rasial, keagamaan, kesukuan, xenofobik, intoleransi dan lain sebagainya di ruang publik demokratik. Mereka kerap kali disebut populis, lebih tepatnya populis sayap-kanan *(right-wing populism)*.

Sebenarnya partai-partai politik dan para politisi kita juga memainkan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi politik elektoral. Narasi nasionalisme, pro-asing, pribumi dan non-pribumi, muslim dan non-muslim, putra asli daerah dan luar daerah, Jawa dan luar Jawa, merupakan kosa kata yang bisa dengan mudah kita jumpai dalam kontestasi elektoral, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bukankah kosa kata tersebut mencerminkan glorifikasi akan politik identitas

dan sentimen primordial? Politik identitas dan sentimen primordial akan selalu aktual dalam politik demokratik kita.

Menuduh pihak lain sebagai ancaman terhadap demokrasi karena politik identitas dan sentimen primordial tidak sesuai dengan kredo persatuan dan kesatuan bangsa, sembari bermain-main dengan politik identitas dan sentimen primordial secara santun sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan sikap standar ganda—jika tidak ingin disebut pengecut. Persoalannya bukan pada apakah ia haram dan halal, baik dan buruk, ataupun salah dan benar bagi politik demokrasi kita, tetapi lebih pada bagaimana politik identitas dan sentimen primordial tersebut diartikulasikan dalam ruang publik demokrasi. Misalnya, identitas masyarakat adat digunakan untuk melawan perusakan hutan adat untuk kepentingan korporasi atau identitas keperempuanan dimajukan untuk mengampanyekan tatanan dunia yang adil dan setara bagi perempuan, dan lain sebagainya. Kedua contoh ini menggunakan politik identitas dan sentimen primordial untuk menyuarakan aspirasi politik mereka sebagai kelompok yang termarginalkan.

Agar tidak terus menerus terjebak dalam jurang demonisasi yang lebih dalam, hingga melupakan langkah dan strategi alternatif untuk melawan orang-orang atau kelompok yang disinyalir antidemokratik, buku *For a Left Populism* karya Chantal Mouffe ini penting untuk dijadikan rujukan—di samping karya-karya Mouffe lainnya

yang memang menjadi landasan dan rujukan teoretik buku ini. Melalui *For a Left Populism*, Mouffe hendak mengetengahkan bahwa demokrasi adalah medan kontestasi, dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat, di mana pelbagai kemungkinan alternatif dapat terjadi; termasuk kemungkinan apakah suatu tatanan menjadi lebih demokratis atau justru lebih totaliter. Memang, demokrasi senantiasa berada dalam kerentanan, dan pada watak kerentanan inilah kita harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk sekalipun. Contohnya seperti pembunuhan demokrasi oleh orang-orang atau kelompok yang bertindak *undemocratic* setelah mereka memenangkan pemilihan umum, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Fareed Zakaria dalam 'Bangkitnya Demokrasi yang Tak Liberal' (2005).

Sebelum demokrasi benar-benar lumpuh di tangan para populis kanan, populis kiri *(left-wing populism)*—yang meresonansikan nilai-nilai ideal dan visi progresif demokrasi—harus turut serta dalam medan kontestasi demokratik. Buku *For a Left Populism* ini merupakan panduan strategi-praktis—bukan dalam arti seperti buku *how to* atau buku saku panduan penggunaan kulkas—yang diperuntukkan Mouffe untuk kubu kiri agar bangkit dari keterpurukannya dan terlibat dalam medan tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan, seperti yang dinyatakan secara tegas oleh Mouffe sendiri, strategi-praktis dalam buku ini diadopsi dari strategi populisme

kanan dengan tokoh seperti Margaret Thatcher.

Terdapat setidaknya dua hal yang saya garis bawahi dari pemikiran Mouffe perihal bagaimana kubu kiri harus ikut serta dalam medan kontestasi demokratik, sehingga mampu memulihkan dan memperdalam demokrasi—meradikalisasi demokrasi. Pertama, demonisasi terhadap populisme kanan tidak menghasilkan apa-apa selain kegagahan menghakimi dan mencela pihak yang berbeda. Tindakan ini tidak lantas membuat orang-orang yang tergabung dalam lingkaran populisme kanan insaf dan mengalihkan dukungan pada kubu kiri.

Menurut Mouffe, tindakan semacam itu bersumber dari ketidakcakapan kubu kiri untuk memahami watak dasar politik demokrasi, konflik, dan terjebak dalam kurungan konsensus-rasional. Alhasil, ketika aspirasi politik dinilai irasional, seperti politik identitas dan sentimen primordial, maka akan dihakimi dan dicemooh sebagai bahaya demokrasi. Padahal kerangka konsensus-rasional dalam demokrasi sangat problematik: ia bersifat represif dan mengeksklusi yang-berbeda, yang menurut saya juga *undemocratic*; sebelum masuk ke dalam percakapan ruang publik demokratik, kita harus melewati *screening* rasionalitas terlebih dahulu, sehingga dihasilkanlah percakapan yang lulus sensor rasionalitas.

Cara kerja politik demokratik tidak demikian. Tata laku berdemokrasi diatur oleh etika-politik kesetaraan dan kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip utama demokrasi, bukan rasionalitas. Atas dasar prinsip ter-

sebut, semua aspirasi politik absah dalam demokrasi. Apalagi, terang Mouffe, manusia beserta relasi sosialnya digerakkan oleh hasrat, afeksi, ketimbang rasionalitas. Dalam konteks ini, Mouffe mengadopsi pemikiran Sigmund Freud tentang libido dan Spinoza tentang *conatus*.

Oleh karena itu, penting bagi kubu kiri untuk memahami watak konflik dari politik demokrasi dan aspek afeksi dari relasi sosial manusia agar keluar dari kungkungan konsensus-rasional. Sehingga, tugas kubu kiri bukanlah mengejar rasionalitas dan kemasukakalan supaya dapat masuk dalam percakapan ruang publik demokratik, melainkan mengajukan strategi dan praktik yang dapat menyentuh aspek afeksi warga negara agar tertarik dan mau terlibat dengan proyek politik kiri.

Kedua, kubu kiri harus keluar dari esensialisme kelas. Kemunculan gerakan sosial baru pada 90-an yang berkembang pesat sampai hari ini seperti gerakan feminisme, gerakan orientasi seksual, serta gerakan ekologis yang sedang mencuat saat ini menandakan bahwa kelas bukanlah determinan utama dan identitas politik yang istimewa. Isu kelas berada pada posisi yang setara dengan gerakan ekologis, orientasi seksual, dan gerakan perjuangan lainnya. Perkembangan ini mengharuskan kubu kiri 'mengamati bagaimana orang-orang dalam kenyataan, bukan bagaimana mereka harus sesuai dengan teori tertentu.' Karenanya, kubu kiri harus selalu meletakkan dirinya berada dalam peristiwa politik alih-alih

berefleksi di balik peristiwa politik.

Untuk itu, cara yang tepat bagi politik kiri adalah membangun kehendak kolektif dari pelbagai gerakan perjuangan demokratik, dengan meninggalkan keistimewaan kelas pekerja, melalui rantai ekuivalensi. Dalam konteks ini, rantai ekuivalensi dapat terbentuk dengan menjadikan demokrasi beserta nilai-nilainya sebagai penanda simbolik. Apabila populisme kanan membangun kehendak kolektif dengan cara yang xenofobik, rasialis, dan terkotak-kotakan berdasarkan suku dan agama, pribumi dan non-pribumi, maka populisme kiri harus mengonstruksi kehendak kolektif sebagai aliansi rakyat yang termarginalkan secara struktur ekonomi-politik, seperti komunitas LGBT, kaum buruh, gerakan perempuan, ekologis, kaum miskin, dan lain sebagainya, melawan segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik, seperti halnya yang disuarakan oleh Jeremy Corbyn, *"Democracy for the many, not for the few."* Tentu saja, kehendak kolektif rakyat ini bersifat temporer. Jika tidak, maka akan terjebak lagi ke dalam jurang esensialisme.

Selain itu, strategi populisme kiri yang dimajukan oleh Mouffe tidak menghendaki pemutusan total dengan negara dan institusi-institusi demokratik seperti partai politik. Alasannya adalah kedua entitas tersebut penting sebagai medan transformasi, terutama menyangkut hal-hal publik seperti kesehatan dan pendidikan, yang tidak mungkin terjadi perubahan secara radikal dan meluas

tanpa ‘menunggangi’ kedua entitas tersebut.

Walaupun buku ini ditulis dalam konteks Eropa Barat, strategi populisme kiri memiliki benang merah di pelbagai konteks, termasuk Indonesia. Apabila dalam konteks Indonesia kata ‘kiri’ masih menyisakan momok karena peristiwa kelam di masa lalu yang belum terang, strategi ini dapat diidentifikasi dengan nama lain, sejauh dalam tingkat analitis dapat disebut sebagai strategi populisme kiri.

Melfin Zaenuri
Yogyakarta, November 2020

Daftar Isi

Dari Penerjemah	**vii**
Pengantar	**1**
1. Momen Populis	**9**
2. Belajar dari Tatcherisme	**29**
3. Meradikalisasi Demokrasi	**47**
4. Pembentukan Koalisi Rakyat	**71**
5. Kesimpulan	**97**
Lampiran Teoretis	**107**
Persembahan	**117**
Indeks	**119**

PENGANTAR

PADA mulanya buku ini muncul dari keyakinan saya bahwa merupakan hal mendesak bagi gerakan kiri untuk merengkuh watak krisis dan tantangan hari ini yang ditunjukkan dengan adanya 'momen populis'. Kita sedang menyaksikan krisis formasi hegemoni neoliberal dan krisis ini membuka kemungkinan untuk membentuk tatanan yang lebih demokratik. Untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini, penting untuk berdamai dengan watak transformasi yang terjadi dalam titi mangsa tiga puluh tahun terakhir dan konsekuensinya terhadap politik demokrasi.

Saya yakin bahwa banyak partai sosialis dan sosial-demokratik berada dalam kekalutan karena kepercayaannya pada konsepsi politik yang tidak tepat, sebuah konsepsi yang telah menjadi pusat refleksi kritis saya selama beberapa tahun. Kritik ini telah dimulai dalam *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*,[1] yang saya tulis bersama Ernesto Laclau dan terbit pada 1985.

[1] Selanjutnya akan disingkat HSS.

Yang mendorong kami menulis buku tersebut adalah karena ketidakmampuan politik kiri, baik versi Marxis maupun versi sosial-demokratik, untuk memperhitungkan serangkaian gerakan yang muncul setelah pemberontakan 1968 dan berkelindan dengan perlawanan pelbagai macam bentuk dominasi yang tidak bisa diformulasikan ke dalam konsep kelas. Gelombang kedua feminisme, gerakan gay, perjuangan anti-rasial, dan isu lingkungan telah mengubah panorama politik secara mendalam, tetapi partai-partai kiri tradisional tidak reseptif terhadap tuntutan tersebut sebab karakter politisnya tidak bisa diterima. Dalam rangka mengatasi kekurangan tersebut, kami memutuskan untuk menyelidiki dasar pemikiran dari situasi semacam itu.

Kami segera sadar bahwa kendala yang harus diatasi berasal dari perspektif esensialis dominan dalam pemikiran kiri. Menurut perspektif ini, yang kami istilahkan dengan 'esensialisme kelas', identitas politik merupakan ekspresi dari posisi agen-agen sosial dalam relasi produksi dan kepentingan agen tersebut ditentukan oleh posisinya tersebut. Tidak mengejutkan jika perspektif semacam ini gagal memahami pelbagai tuntutan yang tidak berbasis pada 'kelas'.

Bagian penting dari buku ini diperuntukkan untuk menyangkal pendekatan esensialis dengan menggunakan pandangan-pandangan dari postrukturalisme. Kami mengombinasikan pandangan tersebut dengan pandangan Antonio Gramsci, lalu mengembangkan sebuah alternatif

pendekatan 'anti-esensialis' yang cocok untuk memahami multiplisitas perjuangan melawan pelbagai bentuk dominasi. Untuk memberikan ekspresi politis pada artikulasi perjuangan tersebut, kami mendefinisikan kembali proyek sosialis dengan mengajukan konsep 'radikalisasi demokrasi'.

Proyek tersebut terdiri dari pembentukan 'rantai ekuivalensi' yang mengartikulasikan pelbagai tuntutan kelas pekerja dengan tuntutan gerakan baru untuk membangun sebuah 'kehendak bersama' dengan tujuan menciptakan apa yang Gramsci sebut sebagai 'hegemoni ekspansif'. Melalui perumusan kembali proyek gerakan kiri dalam konsep 'demokrasi radikal dan plural', kami menghendaki arena revolusi demokratik yang lebih luas, yang menunjukkan bahwa pelbagai perjuangan untuk emansipasi didasarkan pada pluralitas agen sosial dan perjuangan agen tersebut. Dengan demikian, arena konflik sosial lebih luas daripada terkonsentrasi dalam 'agen istimewa' *(privileged agent)* seperti kelas pekerja. Yang jelas, berlawanan dengan beberapa pembacaan yang tidak jujur terhadap argumen kami, kami tidak bermaksud mengistimewakan tuntutan gerakan baru dengan mengorbankan tuntutan kelas pekerja. Kami menekankan perlunya politik kiri untuk mengartikulasikan perjuangannya terhadap berbagai bentuk-bentuk subordinasi tanpa menghubungkan sentralitas *a priori* terhadap satupun gerakan.

Kami juga menunjukkan bahwa perluasan dan radi-

kalisasi perjuangan demokratik tidak akan pernah mencapai sebuah masyarakat yang sepenuhnya terbebaskan, dan proyek emansipatoris tidak dapat dipahami lagi sebagai peniadaan negara. Akan selalu ada antagonisme, perjuangan dan kekaburan parsial dari yang-sosial. Inilah kenapa mitos komunisme sebagai sebuah masyarakat transparan dan damai—yang dengan jelas menunjukkan berakhirnya politik—harus ditinggalkan.

Buku ini ditulis dalam sebuah krisis yang ditandai dengan krisis formasi hegemoni sosial-demokratik selama tahun-tahun pascaperang. Nilai-nilai sosial-demokratik sedang ditantang oleh serangan neoliberal, tetapi nilai-nilai tersebut masih berpengaruh dalam membentuk pandangan umum masyarakat Eropa Barat, tujuan kami adalah untuk menjelaskan cara mempertahankan dan meradikalisasi nilai-nilai tersebut. Sayangnya, ketika edisi kedua HSS terbit pada 2000, kami mencatat dalam kata pengantar yang baru bahwa dalam lima belas tahun sejak publikasi pertamanya, kemunduran besar terjadi. Di bawah tuntutan 'modernisasi', semakin banyak partai sosial-demokratik telah menyingkirkan identitas 'kiri'-nya dan secara eufimistik menyebutnya sebagai 'kiri-moderat'.

Krisis baru ini telah saya analisis dalam buku *On the Political* yang terbit pada 2005, di dalamnya saya membahas dampak dari teori 'jalan ketiga' yang dikonsepsikan di Inggris oleh Anthony Giddens dan diimplementasikan oleh Tony Blair dan Partai Buruh Baru-nya *(New Labour*

Party). Saya telah menunjukkan bagaimana, setelah menerima hegemoni yang dibangun oleh Margaret Thatcher tentang dogma bahwa tidak ada alternatif atas globalisasi neoliberal, yang dikenal dengan 'TINA', pemerintahan kiri-moderat baru akhirnya mengimplementasikan apa yang Stuart Hall sebut sebagai 'sosial-demokrasi versi neoliberalisme'. Dengan mengklaim bahwa model politik oposisi dan posisi kiri/kanan telah usang, dan merayakan 'konsensus sebagai pusat' antara kanan-moderat dan kiri-moderat, apa yang disebut sebagai 'moderat radikal' ini menawarkan bentuk politik teknokratik di mana politik bukan merupakan konfrontasi partisan tetapi manajemen netral terhadap urusan publik.

Seperti yang Tony Blair biasa katakan: 'Pilihannya bukan antara kebijakan ekonomi sayap-kiri dan sayap-kanan tetapi antara kebijakan ekonomi yang baik dan yang buruk.' Globalisasi neoliberal dipandang sebagai takdir di mana kita harus menerimanya, dan persoalan politik direduksi menjadi sekadar permasalahan teknis yang dapat ditangani oleh para ahli. Tidak ada ruang tersisa bagi warga negara untuk memiliki pilihan nyata di antara proyek politik yang berbeda-beda, peran mereka menjadi terbatas pada menerima kebijakan 'rasional' yang diuraikan oleh para ahli tersebut.

Berlawanan dengan orang-orang yang menggambarkan situasi semacam itu sebagai kemajuan untuk mematangkan demokrasi, saya berargumen bahwa situasi 'pascapolitik' ini berasal dari proses ketidakpuasan dengan

institusi-institusi demokrasi, yang termanifestasikan dalam peningkatan golput. Saya juga memperingatkan kesuksesan partai-partai populis sayap-kanan yang berpura-pura menawarkan alternatif dengan mengembalikan suara pada rakyat yang selama ini telah dirampas oleh kekuasaan elite. Saya mendesak perlunya memutus hubungan dengan konsensus pascapolitik dan meneguhkan kembali watak politik partisan untuk menciptakan kondisi perdebatan 'agonistik' tentang alternatif-alternatif yang mungkin.

Pada waktu itu, sebagaimana telah saya sadari sekarang, saya masih berpikiran bahwa partai-partai sosialis dan sosial-demokratik bisa melakukan transformasi untuk mengimplementasikan proyek radikalisasi demokrasi yang kami ajukan dalam HSS.

Ternyata, hal tersebut tidak terjadi dan partai-partai sosial-demokratik telah memasuki proses kemunduran di sebagian besar negara demokrasi Eropa Barat, sementara kemajuan penting telah dilakukan oleh populisme sayap-kanan. Meskipun demikian, krisis ekonomi 2008 membuka kontradiksi model neoliberal dan hari ini formasi hegemoni neoliberal sedang dipertanyakan oleh pelbagai gerakan anti-kekuasaan, baik itu dari kubu kanan maupun dari kubu kiri. Inilah krisis baru, yang saya sebut sebagai 'momen populis', yang saya hendak kuliti lewat buku ini.

Argumen utama buku ini adalah untuk terjun dalam krisis hegemonik, membangun batas politik dan populis-

me kiri—dapat dipahami sebagai strategi diskursif untuk membangun batas politik antara 'rakyat' dan 'oligarki'—yang dalam krisis saat ini merupakan jenis politik yang diperlukan untuk memulihkan dan memperdalam demokrasi.

Ketika saya menulis buku *On the Political*, saya menyarankan untuk menghidupkan kembali batas kiri/kanan, tetapi saya sekarang yakin bahwa, sebagaimana konfigurasi tradisional, batas semacam itu tidak lagi tepat untuk mengartikulasikan kehendak kolektif yang mengandung pelbagai macam tuntutan demokratik yang ada saat ini. Momen populis merupakan ekspresi dari serangkaian tuntutan heterogen, tidak dapat diformulasikan hanya dengan istilah kepentingan yang berkaitan dengan penentuan kategori-kategori sosial. Lagi pula, dalam kapitalisme neoliberal bentuk-bentuk baru subordinasi telah lahir di luar proses produksi. Bentuk baru tersebut memunculkan tuntutan yang tidak lagi sesuai dengan sektor sosial yang didefinisikan dalam istilah sosiologis dan oleh posisinya dalam struktur sosial. Tuntutan semacam itu—menjaga lingkungan, perjuangan melawan seksisme, rasisme dan bentuk-bentuk lain dominasi—menjadi semakin penting. Inilah kenapa batas politik hari ini perlu untuk dikonstruksikan dalam mode transversal 'populis'. Meskipun demikian, saya juga akan berargumentasi bahwa dimensi 'populis' tidaklah cukup untuk menentukan jenis politik yang dibutuhkan oleh krisis saat ini. Jenis politik tersebut perlu dikualifikasikan

sebagai populisme 'kiri' untuk menunjukkan nilai-nilai yang hendak dicapai oleh populisme ini.

Dengan mengakui peran krusial yang dimainkan oleh diskursus demokrasi dalam imajinasi politik masyarakat kita, dan dengan membangun—di sekitar demokrasi sebagai penanda hegemonik—rantai ekuivalensi antar pelbagai macam perjuangan melawan subordinasi, strategi populis kiri beresonansi dengan aspirasi banyak orang. Dalam beberapa tahun mendatang, saya berargumentasi bahwa poros utama konflik politik akan berlangsung antara populisme sayap-kanan dan populisme sayap-kiri. Sebagai hasilnya, melalui konstruksi atas 'rakyat', sebuah kehendak kolektif muncul dari mobilisasi afeksi bersama dalam mempertahankan kesetaraan *(equality)* dan keadilan *(justice)*, yang mungkin akan mengalahkan kebijakan xenofobik dari populisme sayap-kanan.

Dalam menciptakan kembali batas politik, 'momen populis' mengarah ke 'kembalinya yang-politis' setelah beberapa tahun berada dalam kondisi pascapolitik. Kembalinya yang-politis ini mungkin membuka jalan bagi solusi otoritarianisme—melalui rezim yang melemahkan institusi-institusi demokrasi-liberal—tetapi juga dapat membawa ke penegasan kembali (reafirmasi) dan perluasan nilai-nilai demokrasi. Segala sesuatu akan bergantung pada kekuatan politik mana yang akan berhasil dalam menghegemoni tuntutan demokratik saat ini dan jenis populisme yang muncul sebagai pemenang dari perjuangan melawan pascapolitik.[]

1

MOMEN POPULIS

SAYA ingin memperjelas di awal bahwa tujuan saya bukanlah menambah kontribusi pada banyaknya 'studi populisme' yang telah ada dan saya tidak ada niatan untuk masuk ke dalam perdebatan akademik tentang 'hakikat sejati' populisme. Buku ini dimaksudkan sebagai intervensi politik dan secara terang-terangan mengakui sifat partisan dari populisme. Saya akan mendefinisikan apa yang saya pahami dengan 'populisme kiri' dan berpendapat bahwa dalam kondisi krisis saat ini populisme kiri menyediakan strategi yang tepat untuk memulihkan dan memperdalam cita-cita kesetaraan dan kedaulatan rakyat yang memang bersifat konstitutif terhadap politik demokrasi.

Sebagai seorang teoretikus politik, cara saya berteori mengambil sikap dari Machiavelli, sebagaimana Althusser mengingatkan kita, ia seorang yang selalu meletakkan

dirinya berada 'dalam kondisi krisis' alih-alih berefleksi 'di balik kondisi krisis'. Dengan mengikuti contoh dari Machiavelli, saya akan menuliskan refleksi saya pada fenomena tertentu untuk mencari apa yang Machiavelli sebut *verita effetuale de la cosa* (kebenaran efektif dari sesuatu) dari 'momen populis' yang saat ini kita saksikan di negara-negara Eropa Barat. Saya membatasi analisis saya pada Eropa Barat karena, meski persoalan populisme juga relevan di Eropa Timur, negara-negara di Eropa Barat membutuhkan analisis khusus. Hal ini juga terjadi dengan pelbagai bentuk populisme Amerika Latin. Meskipun terdapat 'kemiripan rumpun' antara bermacam-macam populisme, tetapi populisme tersebut merujuk pada fenomena tertentu yang khas dan membutuhkan pemahaman yang sesuai dengan konteksnya. Semoga refleksi saya terhadap fenomena Eropa Barat akan memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk membaca situasi populis yang lain.

Sekalipun tujuan saya bersifat politis, namun bagian penting dari refleksi saya akan bersifat teoretis karena strategi populis kiri yang saya pertahankan terpengaruh oleh pendekatan teoretik anti-esensialis yang menyatakan bahwa masyarakat selalu terbagi dan terkonstruksi secara diskursif melalui praktik-praktik hegemonik. Banyak kritik yang dialamatkan pada 'populisme kiri' berdasarkan pada kurangnya pemahaman pada pendekatan ini dan itulah sebabnya penting untuk membuatnya jelas di sini. Saya akan merujuk pada beberapa prinsip uta-

ma pendekatan anti-esensialis di beberapa poin dalam argumen saya dan klarifikasi lebih lanjut akan tersedia dalam lampiran teoretik di akhir buku ini.

Untuk menghilangkan kebingungan, saya akan mulai dengan merinci apa yang saya pahami dengan 'populisme'. Menyingkirkan arti buruk dari istilah ini yang telah dipaksakan oleh media untuk mendiskualifikasi semua pandangan berlawanan dengan *status quo*, saya akan mengikuti pendekatan analitik yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau. Pendekatan tersebut memungkinkan untuk mengatasi persoalan populisme dengan cara yang menurut saya sangat bermanfaat.

Dalam bukunya *On Populist Reason*, Laclau mendefinisikan populisme sebagai strategi diskursif untuk mengonstruksi batas politik yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu dan menyerukan untuk memobilisasi rakyat *('underdog')* melawan penguasa *('those in power')*[1]. Populisme bukanlah ideologi dan tidak bisa diatribusikan pada program-program tertentu. Populisme juga bukan sebuah rezim politik. Populisme adalah cara berpolitik yang bisa mewujud pada pelbagai bentuk ideologi tergantung pada waktu dan tempatnya, dan populisme kompatibel dengan pelbagai struktur institusi. Kita bisa berbicara tentang 'momen populis' ketika, di bawah tekanan transformasi politik ataupun sosial-ekonomi, hegemoni dominan sedang dide-stabilkan oleh multiplikasi tuntutan yang tidak terpuaskan. Dalam situasi demikian,

[1] Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (New York and London: Verso, 2005).

institusi-institusi yang ada gagal untuk menjamin kesetiaan rakyat sebagaimana institusi-institusi tersebut berusaha untuk mempertahankan tatanan yang ada. Akibatnya, blok historis yang menyediakan basis sosial formasi hegemoni menjadi terpecah-pecah dan muncul kemungkinan untuk membangun subjek kolektif baru—rakyat *(the people)*—yang mampu mengonfigurasikan ulang tatanan sosial yang dianggap tidak adil.

Kondisi inilah yang saya maksud mencirikan kondisi krisis kita saat ini, maka tepat untuk menyebutnya sebagai 'momen populis'. Momen populis menandakan krisis formasi hegemoni neoliberal yang telah diimplementasikan di Eropa Barat sepanjang tahun 1980-an. Formasi hegemoni neoliberal ini menggantikan negara kesejahteraan sosial-demokrasi ala Keynesian yang, dalam tiga puluh tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-II, menyediakan model prinsip sosial-ekonomi di negara-negara demokrasi di Eropa Barat. Inti dari formasi hegemoni baru ini dikonstruksi oleh serangkaian praktik politik-ekonomi yang bertujuan memaksakan aturan pasar—deregulasi, privatisasi, penghematan/pengetatan fiskal—dan membatasi peranan negara terhadap proteksi hak-hak kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Neoliberalisme adalah istilah untuk mengacu kepada formasi hegemoni baru ini yang tidak terbatas pada ranah ekonomi, tetapi juga mengandung seluruh konsepsi masyarakat dan individu yang didasarkan pada filsafat individualisme posesif.

Model yang diimplementasikan di pelbagai negara dari tahun 1980-an hingga tahun-tahun berikutnya, tidak menghadapi tantangan yang signifikan sampai terjadinya krisis finansial pada 2008, ketika neoliberalisme benar-benar mulai memperlihatkan keterbatasannya. Krisis ini, bermula pada 2007 di Amerika Serikat dengan jatuhnya pasar hipotek subprima, berkembang menjadi krisis bank internasional dengan ditandai kegagalan bank investasi Lehman Brothers pada tahun berikutnya. Dana talangan besar-besaran dari lembaga keuangan harus diinisiasi untuk menghambat kehancuran sistem keuangan dunia. Akibatnya penurunan ekonomi global sangat mempengaruhi beberapa ekonomi Eropa dan memicu krisis utang Eropa. Untuk mengatasi krisis ini, kebijakan penghematan diterapkan di sebagian besar negara-negara Eropa, dengan efek drastis, terutama di negara-negara Selatan.

Pada saat terjadinya krisis ekonomi, rentetan kontradiksi mengemuka, mengarah ke apa yang Gramsci sebut sebagai *interregnum*: masa krisis di mana beberapa prinsip konsensus yang dibangun di sekitar proyek hegemoni sedang diuji. Solusi terhadap krisis tersebut belum mengemuka dan kondisi ini menandai 'momen populis' yang kita saksikan hari ini. 'Momen populis' merupakan ekspresi dari pelbagai resistensi terhadap transformasi ekonomi dan politik yang tampak selama tahun-tahun hegemoni neoliberal. Transformasi ini mengarah pada situasi yang kita sebut 'pascademokrasi' sebagai tanda terkikisnya dua pilar ideal demokrasi: kesetaraan dan

kedaulatan rakyat. Saya akan menjelaskan dalam sebuah kesempatan bagaimana keterkikisan tersebut terjadi tetapi sebelum itu, penting untuk menguji apa yang disebut dengan 'pascademokrasi'.

'Pascademokrasi', pertama kali dimajukan oleh Colin Crouch untuk menandakan kemerosotan peranan parlemen dan hilangnya kedaulatan yang merupakan konsekuensi dari globalisasi neoliberal. Menurut Crouch:

> Penyebab utama terjadinya kemunduran demokrasi dalam politik kontemporer adalah ketidakseimbangan yang sekarang berkembang antara kepentingan korporasi (perusahaan) dan kepentingan kelompok-kelompok lain. Bersamaan dengan terjadinya kemunduran demokrasi yang tidak terhindarkan, kondisi ini menjadikan politik sekali lagi sebagai urusan elite tertentu, sebagaimana pernah terjadi di masa pra-demokrasi.[2]

Jacques Rancière juga menggunakan istilah pascademokrasi ini, yang ia definisikan dengan cara berikut:

> Pascademokrasi merupakan praktik pemerintah dan legitimasi konseptual dari demokrasi *setelah* demos (rakyat), yakni demokrasi yang telah mengeliminasi partisipasi, kesalahan perhitungan, dan perselisihan rakyat, sehingga mudah direduksi menjadi satu-satunya interaksi mekanisme negara dan kombinasi energi sosial dan kepentingan.[3]

2 Colin Crouch, *Post-Democracy* (Cambridge, UK: Polity, 2004), hal. 104.

3 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, trans. Julie Rose (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), hal. 102.

Meskipun tidak setuju dengan kedua definisi tersebut, interpretasi saya atas istilah 'pascademokrasi' agak berbeda karena, melalui refleksi atas sifat dasariah demokrasi liberal, saya bertujuan untuk mengemukakan corak berbeda dari neoliberalisme. Sebagaimana telah diketahui, secara etimologis, 'demokrasi' berasal dari bahasa Yunani *demos/kratos*, yang berarti 'kekuasaan rakyat'. Ketika kita membahas 'demokrasi' di Eropa, bagaimanapun juga kita mengacu pada model demokrasi yang spesifik: model Barat yang dihasilkan dari guratan prinsip demokrasi dalam konteks historis tertentu. Model ini memiliki pelbagai nama: demokrasi representatif, demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, demokrasi pluralis.

Dalam banyak konteks, apa yang menjadi pertanyaan adalah rezim politik yang dicirikan oleh artikulasi dua tradisi berbeda. Pada satu sisi, tradisi liberalisme politik: penegakan hukum, pemisahan kekuasaan, dan pembelaan kebebasan individu; pada sisi lain, tradisi demokrasi, yang ide utamanya berupa kesetaraan dan kedaulatan rakyat. Tidak ada hubungan yang signifikan antara dua tradisi tersebut tetapi sekadar artikulasi historis yang kontingen, seperti yang telah ditunjukkan CB Macpherson, terjadi dalam perjuangan bersama antara para liberal dan para demokrat melawan rezim absolut.[4]

Beberapa penulis, seperti Carl Schmitt, menegaskan bahwa artikulasi tersebut menghasilkan rezim yang tidak

4 CB Macpherson, *The Life and Times of Liberal Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1977).

mungkin terjadi karena liberalisme menyangkal demokrasi dan demokrasi menyangkal liberalisme. Penulis lain, mengikuti Jürgen Habermas, mempertahankan 'koorisinalitas' prinsip kebebasan dan kesetaraan. Schmitt benar dalam menunjukkan adanya konflik antara 'konsepsi' liberal yang memostulatkan universalitas dan 'kemanusiaan', dan 'konsepsi' kesetaraan demokrasi yang mensyaratkan pembentukan rakyat dan batas antara 'kita' dan 'mereka'. Tetapi saya kira Schmitt keliru dalam mengemukakan bahwa konflik merupakan kontradiksi yang pasti membawa demokrasi liberal pluralistik ke jurang kerusakan-diri sendiri *(self-destruction)*.

Dalam *The Democratic Paradox*, saya mengonsepsikan artikulasi dua tradisi tersebut—yang memang pada akhirnya tidak dapat direkonsiliasikan—pada mode konfigurasi paradoks, sebagai *lokus ketegangan (the locus of a tension)* yang mendefinisikan orisinalitas demokrasi liberal sebagai *politeia*, suatu bentuk komunitas politik yang menjamin karakter pluralistiknya.[5] Logika demokrasi perihal pembentukan rakyat dan pembelaan terhadap praktik-praktik egaliter merupakan hal yang penting untuk mendefinisikan demos dan menghancurkan tendensi diskursus liberal yang ingin mengabstrakkan universalisme. Tetapi artikulasi logika demokrasi dengan logika liberal memperkenankan kita untuk menguji bentuk-bentuk eksklusi yang inheren dalam praktik-praktik politik penentuan rakyat yang akan memerintah.

[5] Chantal Mouffe, The Democratic Paradox (New York and London: Verso, 2000).

Politik liberal demokrasi terdiri dari proses negosiasi konstan melalui konfigurasi hegemonik yang berbeda atas ketegangan konstitutif. Ketegangan ini, yang dalam istilah politik diekspresikan dengan batas antara kanan dan kiri, hanya dapat distabilkan secara temporer melalui negosiasi pragmatis antar kekuatan politik. Negosiasi-negosiasi pragmatis tersebut selalu membentuk hegemoni kekuatan politik yang satu atas kekuatan politik yang lain. Dengan meninjau kembali sejarah demokrasi liberal, kita menemukan bahwa pada beberapa kesempatan logika liberal berlaku, sementara pada kesempatan yang lain berlaku logika demokrasi. Meskipun demikian kedua logika tersebut berada dalam ketegangan, dan kemungkinan negosiasi 'agonistik' antara kanan dan kiri, yang spesifik untuk rezim demokrasi liberal, selalu terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan sebelumnya hanya menyangkut demokrasi liberal yang dipandang sebagai rezim politik, tetapi nyatanya bahwa institusi-institusi politik tersebut tidak pernah berdiri sendiri dalam sistem ekonomi. Dalam kasus neoliberalisme, misalnya, kita berurusan dengan formasi sosial yang mengartikulasikan bentuk tertentu dari demokrasi liberal dengan kapitalisme finansial. Meskipun artikulasi ini perlu diperhitungkan ketika mempelajari formasi sosial yang spesifik, adalah mungkin, pada tingkat analitis, untuk memeriksa evolusi rezim liberal-demokrasi sebagai bentuk politik masyarakat, supaya dapat mengungkap beberapa karak-

teristiknya.

Situasi akhir-akhir ini dapat dideskripsikan sebagai kondisi 'pascademokrasi' karena dalam beberapa tahun terakhir, sebagai konsekuensi hegemoni neoliberal, ketegangan agonistik antara prinsip-prinsip liberal dan demokrasi yang bersifat konstitutif terhadap demokrasi liberal, telah dilenyapkan. Dengan lenyapnya nilai-nilai demokratik kesetaraan dan kedaulatan rakyat, ruang-ruang agonistik di mana proyek-proyek masyarakat yang berbeda-beda bisa saling berkonfrontasi satu sama lain telah lenyap dan warga negara telah dirampas dari kemungkinan untuk menggunakan hak-hak demokratik mereka. Tentu saja, 'demokrasi' masih diperbincangkan, tetapi telah direduksi menjadi sekadar unsur-unsur liberalnya dan hanya menandakan adanya pemilihan umum yang bebas dan pembelaan hak asasi manusia. Yang menjadi semakin penting adalah liberalisme ekonomi dengan pembelaannya terhadap pasar bebas dan banyak aspek dari liberalisme politik ditempatkan pada posisi sekunder, jika tidak benar-benar dilenyapkan. Kondisi inilah yang saya sebut sebagai 'pascademokrasi'.

Di arena politik, evolusi menuju pascademokrasi dimanifestasikan melalui apa yang saya ajukan dalam *On the Political* sebagai 'pascapolitik', kondisi yang mengaburkan batas politik antara kanan dan kiri.[6] Lewat dalih 'modernisasi' yang dipaksakan oleh globalisasi, partai-partai sosial-demokratik telah menerima *diktat* kapital-

[6] Chantal Mouffe, *On the Political* (Abingdon, UK: Routledge, 2005).

isme finansial dan batasan yang mereka terapkan pada intervensi negara dan kebijakan redistributif mereka.

Sebagai akibatnya, peran parlemen dan institusi-institusi yang memperkenankan warga negara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik telah diperkecil secara drastis. Pemilihan umum tidak lagi menawarkan kesempatan untuk menentukan alternatif-alternatif nyata melalui 'partai-partai pemerintah' yang tradisional tersebut. Satu-satunya hal yang pascapolitik perkenankan adalah pergantian kekuasaan secara bipartisan antara partai kanan-moderat dan kiri-moderat. Semua pihak yang menentang 'konsensus sebagai pusat' dan dogma bahwa tidak ada alternatif atas globalisai neoliberal dilabeli sebagai 'ekstremis' atau didiskualifikasi sebagai 'populis'.

Oleh karena itu, politik telah menjadi sekadar persoalan mengatur tatanan yang sudah ada, sebuah ruang yang diperuntukkan untuk para ahli, dan kedaulatan rakyat dinyatakan telah usang. Salah satu pilar simbolik yang fundamental dari ideal demokrasi—kekuasaan rakyat—telah dilenyapkan karena pascapolitik mengeliminir kemungkinan perjuangan agonistik antara pelbagai proyek masyarakat yang berbeda-beda sebagai syarat untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Selain fenomena pascapolitik, terdapat perkembangan lain yang perlu diperhitungkan ketika memahami penyebab kondisi pascademokrasi: berkembangnya oligarkisasi masyarakat Eropa Barat. Perubahan pada level

politik terjadi dalam konteks model baru regulasi kapitalisme. Dengan finansialisasi ekonomi, terdapat ekspansi besar-besaran pada sektor finansial dengan mengorbankan ekonomi produktif. Kondisi ini menjelaskan terjadinya peningkatan ketimpangan sangat besar yang kita saksikan beberapa tahun terakhir.

Kebijakan privatisasi dan deregulasi telah berkontribusi pada terjadinya kemerosotan kondisi pekerja secara drastis. Karena efek deindustrialisasi, promosi perubahan teknologi, dan proses relokasi industri ke negara-negara yang tenaga kerjanya lebih murah, banyak pekerjaan hilang.

Akibat kebijakan penghematan/pengetatan fiskal yang diberlakukan setelah krisis 2008, situasi ini juga berdampak pada sebagian besar kelas menengah yang mengalami proses pemiskinan dan prekarisasi. Sebagai akibat dari proses oligarkisasi tersebut, pilar ideal demokrasi yang lain—pembelaan terhadap kesetaraan—telah disingkirkan juga dari diskursus demokrasi-liberal. Saat ini yang berlaku adalah visi liberal individualistik yang merayakan masyarakat konsumtif dan kebebasan yang ditawarkan oleh pasar.

Pada konteks pascademokrasi di mana terjadi pengikisan ideal demokrasi—kedaulatan rakyat dan kesetaraan— tersebut, 'momen populis' harus dipahami. 'Momen populis' ini dicirikan dengan kemunculan pelbagai resistensi terhadap sistem ekonomi-politik yang dianggap sedang dikontrol oleh segelintir elite yang tuli terhadap

pelbagai tuntutan kelompok *liyan* di masyarakat. Pada mulanya, sebagian besar resistensi politik terhadap konsensus pascademokrasi datang dari golongan kanan. Pada 1990an, partai-partai populis sayap-kanan seperti FPÖ di Austria dan Front Nasional di Prancis mulai mencitrakan diri mereka sebagai pihak yang hendak mengembalikan suara 'rakyat' yang telah dirampas oleh para elite. Dengan menarik batas antara 'rakyat' dan 'penguasa politik', para populis kanan tersebut dapat menerjemahkan tuntutan-tuntutan rakyat yang telah dikucilkan oleh konsensus dominan ke dalam kosakata nasionalistik.

Hal tersebut terjadi, misalnya, pada bagaimana Jörg Haider mentransformasi Partai Kebebasan Austria menjadi sebuah partai protes melawan 'koalisi besar'. Dengan memobilisasi isu kedaulatan rakyat, Haider berhasil mengartikulasikan pelbagai perlawanan/resistensi terhadap cara negara diatur oleh koalisi elite yang menghambat debat demokrasi nyata.[7]

Panorama politik, yang selama ini menunjukkan tanda-tanda radikalisasi kiri dengan pelbagai gerakan anti-globalisasi, berubah drastis pada tahun 2011. Ketika kebijakan penghematan mulai mempengaruhi kondisi kehidupan rakyat di pelbagai sektor, gerakan protes terjadi di beberapa negara Eropa dan konsensus pascapolitik mulai terurai seluk-beluknya. Di Yunani terdapat gerak-

[7] Dalam 'The "End of Politics" and the Challenge of Right-Wing Populism', saya telah menganalisis perkembangan Partai Kebebasan Austria di bawah kepemimpinan Jörg Haider. Lihat Francisco Panizza, ed., *Populism and the Mirror of Democracy* (New York and London: Verso, 2005), hal. 50–71.

an Aganakitsmenoi dan di Spanyol terdapat Indignados M15 yang menduduki pelbagai tempat penting untuk menyuarakan *'Democracy Now!'*. Gerakan-gerakan tersebut diikuti oleh gerakan Occupy yang lahir di Amerika Serikat, juga termanifestasi di pelbagai kota di Eropa, khususnya di London dan Frankfurt. Yang lebih mutakhir adalah Nuit Debout di Prancis pada 2016 yang merupakan ekspresi dari bentuk protes yang disebut sebagai *'movements of the squares'*.

Protes-protes tersebut merupakan pertanda kebangkitan politik setelah bertahun-tahun bersikap apatis. Akan tetapi, penolakan gerakan-gerakan horizontalis tersebut untuk bekerja sama dengan institusi-institusi politik membatasi dampak gerakan mereka sendiri. Tanpa membangun artikulasi dengan institusi politik, mereka akan segera kehilangan dinamikanya. Meskipun gerakan protes tersebut memiliki peran penting dalam membangun transformasi kesadaran politik, tetapi hanya jika diikuti dengan gerakan politik yang terstruktur melalui kerja sama dengan institusi politik, hasil yang signifikan dapat tercapai.

Adalah di Yunani dan Spanyol di mana kita menyaksikan gerakan politik pertama kali yang mengimplementasikan bentuk populisme dengan tujuan memulihkan dan memperdalam demokrasi. Di Yunani, Syriza—sebuah persatuan front sosial yang lahir dari koalisi gerakan kiri yang berbeda-beda di sekeliling Synaspismos, bekas partai komunis Eropa—menjadi pertanda kemunculan

bentuk baru partai radikal yang tujuannya untuk menantang hegemoni neoliberal melalui politik parlementer. Dengan membangun sinergi antara gerakan sosial dan partai politik, Syriza mampu mengartikulasikan secara kolektif pelbagai tuntutan demokratik dan strategi ini memungkinkannya untuk berkuasa pada Januari 2015.

Sayangnya, Syriza tidak mampu mengimplementasikan program anti-penghematannya karena respons yang keras dari Uni Eropa yang bereaksi dengan 'penggulingan finansial' *(financial coup)* dan memaksa partai untuk menerima *diktat* Troika. Ketakmampuan tersebut tidak membatalkan strategi populis yang memungkinkannya untuk berkuasa, meski tentu saja menimbulkan masalah penting sehubungan dengan batasan yang diberlakukan oleh keanggotaan Uni Eropa pada kemungkinan melaksanakan kebijakan yang menantang neoliberalisme.

Di Spanyol, meroketnya Podemos pada 2014 adalah karena kemampuan sekelompok intelektual muda untuk memanfaatkan medan yang telah diciptakan oleh Indignados. Hal ini menyebabkan terbentuknya gerakan partai yang bertujuan untuk memecahkan kebuntuan politik konsensual hasil dari transisi ke arah demokrasi yang telah mengalami keletihan. Strategi Podemos dalam membentuk kehendak kolektif populer dengan membangun batas antara penguasa elite *(la 'casta')* dan rakyat belum berhasil menyingkirkan partai sayap-kanan, Partindo Popular dari pemerintahan, namun anggota-anggota Podemos berhasil masuk ke parlemen di ma-

na mereka menggulingkan sekelompok anggota penting parlemen. Sejak saat itu, mereka menjadi representasi kekuatan penting dalam politik Spanyol dan berhasil mentransformasikan lanskap politik Spanyol.

Perkembangan yang sama juga terjadi di beberapa negara: Jerman dengan Die Linke, Portugal dengan Bloco de Esquerda dan Prancis dengan La France Insoumise dari Jean-Luc Mélenchon, yang pada Juni 2017, satu tahun setelah pendiriannya, berhasil memperoleh tujuh belas kursi di Parlemen dan saat ini menjadi oposisi utama bagi pemerintahan Emmanuel Macron. Pada akhirnya, pada Juni 2017 juga, hasil bagus yang tak terduga dari Partai Buruh Inggris di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn merupakan penanda dari bentuk baru radikalisme yang mengemuka di beberapa negara Eropa.

Partai-partai sosial-demokratik, yang di banyak negara memainkan peran penting dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan neoliberal, tidak dapat memahami watak dari momen populis dan menghadapi tantangan yang diwakilinya. Mereka menjadi tahanan dari dogma pascapolitik, dan enggan untuk mengakui kesalahan mereka, partai-partai sosial-demokratik tidak dapat memahami bahwa banyak tuntutan yang diartikulasikan oleh partai populis sayap-kanan merupakan tuntutan demokratik, yang mana solusi progresif harus dimajukan. Banyak dari tuntutan tersebut berasal dari kelompok-kelompok yang kalah karena globalisasi neoliberal, dan tidak dapat terpuaskan dengan proyek neoliberal.

Mengklasifikasikan partai populis sayap-kanan sebagai 'ekstrem-kanan' atau 'neofasis' dan mengaitkan daya tarik mereka dengan kurangnya pendidikan tentu saja sangat mudah bagi kekuatan kiri-moderat. Hal ini merupakan cara yang mudah untuk mendiskualifikasi mereka tanpa mengakui tanggung jawab kiri-moderat sendiri dalam keadaan seperti itu. Dengan membentuk batas 'moral' untuk menyingkirkan 'para ekstremis' dari debat demokratik, para 'demokrat yang baik' tersebut percaya bahwa mereka dapat menghentikan laju kebangkitan hasrat *(passion)* 'irasional'. Strategi demoninasi terhadap 'musuh' konsensus bipartisan tersebut memang secara moral dapat menghibur, tetapi melemahkan secara politis.

Untuk menghentikan laju partai populis sayap-kanan, perlu untuk merancang jawaban politis secara tepat melalui gerakan populis kiri yang akan menaungi semua perjuangan demokratik melawan pascademokrasi. Alih-alih mengucilkan secara *a priori* para pemilih dari partai populis sayap kanan yang selalu digerakkan oleh hasrat atavistik dengan menghukum mereka untuk tetap menjadi tawanan hasrat tersebut selamanya, penting untuk mengakui inti demokrasi sebagai asal-muasal dari pelbagai tuntutan mereka.

Pendekatan populis kiri harus berusaha memberikan kosa kata yang berbeda untuk mengarahkan tuntutan-tuntutan tersebut ke arah yang lebih egaliter. Bukan berarti membenarkan politik partai populis sayap-kanan,

tetapi menolak untuk mengaitkan pemilih mereka dengan tanggung jawab atas cara tuntutan mereka diartikulasikan. Saya tidak mengelak bahwa terdapat banyak orang yang nyaman dengan nilai-nilai reaksioner tersebut, tetapi saya yakin bahwa terdapat orang-orang yang tertarik kepada partai populis sayap-kanan tersebut karena mereka merasa hanya partai tersebut yang peduli dengan persoalan mereka. Saya percaya bahwa, jika bahasa yang berbeda tersedia, banyak orang mungkin mengalami situasi dengan cara yang berbeda dan bergabung dengan perjuangan progresif.

Terdapat beberapa contoh konkret bahwa strategi semacam itu bisa berhasil. Misalnya, pada pemilihan legislatif 2017 di Prancis, Jean-Luc Mélenchon dan kandidat lain dari La France Insoumise seperti François Ruffin berhasil memperoleh dukungan dari para pemilih yang sebelumnya memilih Marine Le Pen. Berselisih dengan orang-orang di bawah pengaruh Front Nasional, memandang imigran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keterampasan mereka, para aktivis mampu membuat pemilih semacam itu mengubah pandangannya. Sentimen mereka yang kadaluwarsa dan keinginan mereka untuk diakui secara demokratis, yang sebelumnya diekspresikan dalam bahasa xenofobik, dapat diformulasikan dalam kosakata berbeda dan diarahkan untuk menghadapi lawan yang lain. Hal serupa terjadi di Inggris pada pemilu Juni 2017 di mana 16% pemilih partai populis sayap-kanan, UKIP, memilih Jeremy Corbyn.

Saat ini diskursus anti-penguasa juga datang dari kubu progresif, dan kekuatan politik kiri sedang membangun batas antara 'rakyat' dan 'oligarki', kita benar-benar berada di tengah-tengah 'momen populis'. Maka yang dipertaruhkan dalam momen populis ini adalah bagaimana resistensi terhadap pascademokrasi akan diartikulasikan dan bagaimana 'rakyat' akan dikonstruksikan. Ada banyak cara supaya strategi ini bisa terlaksana. Dan tidak semua konstruksi populis terhadap batas politik memiliki tujuan egalitarian, bahkan ketika penolakan terhadap sistem yang ada dilakukan atas nama mengembalikan kekuasaan pada rakyat.

Kedua jenis populisme tersebut bertujuan untuk menyatukan tuntutan-tuntutan yang tidak terpuaskan, tetapi keduanya mempunyai cara/strategi yang sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada komposisi 'kita' dan bagaimana lawan *(adversary)*, 'mereka', didefinisikan.

Populis sayap-kanan mengklaim akan mengembalikan kedaulatan rakyat dan memulihkan demokrasi, tetapi kedaulatan di sini dipahami sebagai 'kedaulatan nasional' dan diperuntukkan untuk mereka yang dianggap sebagai 'nasionalis' sejati. Selain itu, para populis sayap-kanan tidak memperjuangkan tuntutan demi kesetaraan dan mereka mengonstruksikan 'rakyat' dengan mengecualikan banyak kategori, biasanya imigran, yang dipandang sebagai ancaman terhadap identitas dan kesejahteraan nasional. Perlu digaris bawahi bahwa meskipun populisme sayap-kanan mengartikulasikan banyak resistensi

terhadap pascademokrasi, tetapi hal ini tidak serta merta merepresentasikan lawan rakyat sebagaimana yang dikonstruksikan oleh kekuatan neoliberalisme. Oleh karena itu, keliru jika mengidentifikasi oposisi mereka terhadap pascademokrasi dengan penolakan terhadap neoliberalisme. Kemenangan mereka dapat mengarah pada bentuk-bentuk neoliberalisme otoriter nasionalistik yang, atas nama pemulihan demokrasi, pada kenyataannya membatasi demokrasi.

Sebaliknya, populisme kiri hendak memulihkan demokrasi dengan memperdalam dan memperluas demokrasi. Strategi populis kiri bertujuan untuk menyatukan tuntutan-tuntutan demokratik di bawah kehendak kolektif dengan mengonstruksikan 'kita', 'rakyat', melawan lawan-bersama: oligarki. Strategi ini mensyaratkan pembentukan rantai ekuivalensi antar tuntutan-tuntutan buruh, imigran, dan kelas menengah prekariat, serta tuntutan demokratik yang lain seperti komunitas LGBT. Tujuan dari pembangunan rantai tersebut adalah pembentukan hegemoni baru yang mengimplementasikan radikalisasi demokrasi.

2

BELAJAR DARI TATCHERISME

'MOMEN POPULIS' yang kita saksikan di seluruh Eropa Barat memberikan kesempatan untuk mengajukan alternatif atas formasi hegemoni neoliberal yang saat ini sedang mengalami krisis. Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana melakukan transisi ini. Apakah ada contoh-contoh supaya kita bisa belajar langkah-langkah yang perlu kita ikuti? Mungkin, dengan menguliti kondisi di mana model neoliberal menjadi hegemonik di Eropa Barat dapat memberikan beberapa petunjuk pada kita perihal bagaimana transformasi hegemonik dapat beroperasi. Krisis inilah yang kami bahas dalam HSS dan oleh karena itu mungkin relevan untuk meninjau kembali beberapa analisis di dalamnya.

Buku tersebut ditulis di London pada saat krisis konsensus pascaperang yang dimunculkan oleh Partai

Buruh dan Partai Tories seputar negara kesejahteraan Keynesian. Dalam konteks Inggris inilah kami mengembangkan refleksi tentang masa depan politik kiri. Namun, saya percaya bahwa refleksi dalam buku tersebut tidak terbatas di Inggris saja. Sebagaimana ditunjukkan oleh Wolfgang Streeck bahwa:

> Struktur penyelesaian pascaperang antara buruh dan kapital pada dasarnya sama di pelbagai negara di mana kapitalisme demokratis mulai dilembagakan. Hal ini meliputi ekspansi negara kesejahteraan, hak buruh untuk bebas berunding secara kolektif dan jaminan politik atas pekerjaan penuh, yang dijamin oleh pemerintah yang menerapkan perangkat ekonomi Keynesian secara ekstensif.[1]

Untuk memahami hakikat negara kesejahteraan Keynesian sebagai formasi hegemonik, perlu diakui bahwa, meskipun memainkan peran penting dalam menyubordinasikan reproduksi kekuatan buruh dengan kebutuhan kapital, negara kesejahteraan Keynesian juga meletakkan syarat-syarat munculnya jenis baru hak-hak sosial dan mentransformasikan akal sehat demokratis yang memberikan legitimasi pada serangkaian tuntutan untuk kesetaraan ekonomi. Di beberapa negara, kekuatan serikat buruh memungkinkan konsolidasi hak-hak sosial. Sementara itu, pertumbuhan ketidaksetaraan tetap terkendali, para buruh membuat kemajuan yang substansial, dan

[1] Wolfgang Streeck, 'The Crises of Democratic Capitalism' dalam *New Left Review 71* (September/October 2011), 10.

kemajuan demokrasi tercapai selama bertahun-tahun. Sebagai kompromi antara kapital dan buruh, memungkinkan terjadinya koeksistensi yang tidak gampang antara kapitalisme dan demokrasi.

Namun, selama paruh pertama tahun 1970-an, kemunduran ekonomi dan meningkatnya inflasi mulai menjadi petunjuk keterbatasan dari kompromi Keynesian. Akibat efek krisis minyak tahun 1970, ekonomi menderita, keuntungan merosot dan penyelesaian pascaperang melalui jalan sosial-demokratik mulai ambruk. Di Inggris, untuk menghadapi krisis fiskal, Partai Buruh yang sedang berkuasa harus menggunakan negara untuk mendisiplinkan kelas pekerja yang berdampak pada meningkatnya ketidakpuasan. Pada pertengahan tahun 70-an, model sosial-demokratik pascaperang berada dalam masalah yang serius dan mulai menderita 'krisis legitimasi'.

Faktor ekonomi tidaklah cukup untuk memahami secara utuh krisis model sosial-demokratik. Kita juga perlu mempertimbangkan faktor yang lain, terutama kemunculan apa yang disebut sebagai 'gerakan sosial baru' di tahun 1960-an. Pada waktu itu, istilah ini digunakan untuk merujuk ke pelbagai perjuangan yang beraneka ragam: gerakan urban, ekologi, anti-otoritarian, anti-institusional, feminis, anti-rasis, etnik, regional, dan minoritas seksual. Polarisasi politik yang diciptakan oleh tuntutan demokratik baru tersebut, bersamaan dengan militansi buruh, memancing reaksi dari para konservatif yang mengklaim bahwa multiplikasi perjuangan untuk

kesetaraan tersebut telah membawa masyarakat Barat ke tepian 'jurang egalitarian'. Ketika resesi ekonomi terjadi setelah 1973, kubu kanan memutuskan untuk menghentikan ekspansi imajinasi demokratis. Mereka berencana untuk melawan gerakan egalitarian tersebut dan merebut kembali keuntungan yang telah ditahan oleh kekuatan serikat pekerja. Dalam laporannya ke Komisi Trilateral pada tahun 1975, Samuel Huntington menyatakan bahwa perjuangan untuk kesetaraan dan partisipasi yang lebih baik pada tahun 60-an telah menghasilkan 'gelora demokratik' yang membuat masyarakat menjadi 'tak terkendalikan'. Huntington menyimpulkan bahwa 'kekuatan cita-cita demokrasi menimbulkan masalah bagi pemerintahan demokrasi.'[2]

Pada saat kami menulis HSS, Margaret Thatcher baru saja memenangkan pemilihan umum tetapi dampak dari krisis tersebut masih belum jelas. Kami memandang situasi pada waktu itu demikian:

> Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan antagonisme baru dan 'hak-hak baru' yang begitu pesat mengarah pada krisis formasi hegemoni periode pascaperang. Tetapi format bagaimana krisis ini akan di atasi masih jauh dari yang ditentukan sebelumnya, karena cara hak-hak akan didefinisikan dan bentuk-bentuk perjuangan yang akan diadopsi untuk melawan subordinasi belum ditentukan secara tegas.[3]

[2] Samuel Huntington, 'The Democratic Distemper', dalam *The American Commonwealth*, ed. Nathan Glazer dan Irving Kristol (New York: Basic Books, 1976), hal. 37.

[3] Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Ra-*

Kami mengklaim bahwa, untuk melawan serangan dari kubu kanan, sangat penting bagi Partai Buruh untuk memperluas basis sosialnya dengan mengakui kekurangan politik korporatisnya dan menerima kritik dari gerakan sosial baru, tuntutan-tuntutan demokratik mereka sangat penting untuk diartikulasikan di samping tuntutan kelas pekerja. Tujuannya adalah untuk membentuk blok historis baru di sekeliling proyek sosialis yang didefinisikan ulang dengan istilah 'radikalisasi demokrasi'. Kami yakin bahwa hanya proyek hegemonik yang bertujuan memperluas prinsip-prinsip demokratik berupa kebebasan dan kesetaraan ke dalam rangkaian relasi sosial lebih luas yang dapat memberikan hasil progresif untuk menangani krisis.

Sayangnya, Partai Buruh, yang masih menjadi tahanan dari visi ekonomi dan esensialisnya, tidak dapat memahami perlunya politik hegemonik dan masih bergantung pada cara-cara lama dari posisi tradisionalnya. Dengan demikian, Partai Buruh tidak dapat melawan serangan pelbagai kekuatan yang menentang model Keynesian dan kondisi ini membuka jalan bagi kemenangan budaya dan ideologi neoliberal.

Tujuan utama Margaret Thatcher ketika menjadi perdana menteri pada 1979 adalah untuk mengganti konsensus pascaperang antara Partai Tories dan Partai Buruh yang ia klaim sebagai penyebab kemandekan Inggris. Berbeda dengan Partai Buruh, Thatcher sangat

dical Democratic Politics, paperback edition (New York and London: Verso, 2014), hal. 152.

menyadari akan sifat partisan politik dan pentingnya perjuangan hegemonik. Strategi yang digunakan Thatcher jelas-jelas populis. Strateginya berupa pembangunan batas politik antara, pada satu sisi, 'kekuatan penguasa' yang diidentifikasi dengan birokrat negara yang opresif, serikat pekerja, dan orang-orang yang menerima manfaat dari bantuan negara, dan pada sisi lain, 'rakyat' yang menjadi korban kekuasaan birokratik dan para sekutunya.

Target utama Thatcher adalah serikat buruh yang kekuasaannya harus disingkirkan. Thatcher terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Serikat Pekerja Tambang Nasional yang dipimpin oleh Arthur Scargill, Thatcher menyebut sosoknya sebagai 'musuh dari dalam'. Pemogokan masal para penambang (1984-5), yang merupakan perselisihan industrial paling sengit dalam sejarah Inggris, merupakan titik balik dalam lintasan kepemimpinan Thatcher. Perselisihan tersebut berakhir dengan kemenangan mutlak kubu pemerintah yang kemudian memberlakukan syarat-syarat yang melemahkan gerakan serikat buruh dan mengonsolidasikan program ekonomi liberal.

Pada saat konsensus Keynesian pascaperang sedang mengalami keretakan, Margaret Thatcher turun tangan untuk menantang *status quo*. Dengan membentuk batas politik, Thatcher mampu mendisartikulasi unsur-unsur penting dari hegemoni sosial-demokratik dan membangun tatanan hegemoni baru yang didasarkan pada per-

setujuan populer. Hal inilah yang tidak dapat dipahami oleh para politisi Partai Buruh dengan pandangan esensialisnya. Alih-alih melakukan kontra-hegemoni, para politisi Partai Buruh percaya bahwa meningkatnya pengangguran disebabkan oleh kebijakan neoliberal dan memburuknya kondisi pekerja tersebut akan segera mengantarkan para politisi Partai Buruh ke pemerintahan. Para politisi Partai Buruh tersebut secara pasif mengharapkan kemerosotan kondisi ekonomi sehingga dapat menguntungkan mereka tanpa menyadari bahwa, sementara itu, Thatcher sedang mengkonsolidasikan revolusi neoliberal.

Dengan menganalisis strategi hegemonik yang ia sebut 'Thatcherisme' dan didefinisikan sebagai 'populisme otoritarian', Stuart Hall mencatat bahwa 'Populisme Thatcher mengombinasikan pelbagai isu Torisme—bangsa, keluarga, tanggung jawab, otoritas, standar, tradisionalisme—dengan isu-isu agresif neoliberalisme—kepentingan pribadi, individualisme kompetitif, anti-statisme.'[4] Kesuksesan Thatcher dalam mengimplementasikan kebijakan neoliberal di Inggris menjadi mungkin karena kapasitasnya dalam mengapitalisasi pelbagai resistensi terhadap cara kolektifis dan birokratik di mana negara kesejahteraan diterapkan.

Thatcher mampu memperoleh banyak dukungan dari pelbagai sektor atas proyek neoliberalnya karena banyak

4 Stuart Hall, 'Learning from Thatcherism', dalam *The Hard Road to Renewal* (New York and London: Verso, 1988), hal. 271.'Learning from Thatcherism' merupakan judul dari bab ini.

orang terpikat dengan glorifikasi Thatcher terhadap kebebasan individu dan janji Thatcher untuk membebaskan orang-orang tersebut dari kekuasaan negara yang opresif. Diskursus tersebut beresonansi, bahkan di kalangan para penerima manfaat intervensi negara, karena mereka membenci cara birokrasi di mana manfaat tersebut sering didistribusikan. Lewat jalan mempertentangkan kepentingan-kepentingan kelas pekerja dengan kepentingan feminis dan imigran, yang dianggap bertanggung jawab atas hilangnya beberapa pekerjaan, Thatcher berhasil memenangkan sektor-sektor penting kelas pekerja.

Dalam serangannya yang gencar terhadap hegemoni sosial-demokratik, Margaret Thatcher melakukan intervensi pada beberapa sektor—ekonomi, politik dan ideologi—untuk mengonfigurasi ulang secara diskursif apa yang pada waktu itu dianggap sebagai 'pandangan umum' *(common sense)* dan melawan nilai-nilai demokratiknya. Tujuan utamanya untuk memutus hubungan yang telah ditetapkan antara liberalisme dan demokrasi melalui, sebagaimana dikemukakan CB Macpherson, 'demokratisasi' liberalisme.

Friedrich Hayek, filsuf favorit Thatcher, menyatakan akan perlunya menguatkan kembali sifat 'sebenarnya' dari liberalisme sebagai doktrin yang berupaya untuk mengurangi kekuasaan negara seminimal mungkin untuk memaksimalkan tujuan utama dari politik: kebebasan individu. Pandangan ini merupakan gagasan yang Hayek definisikan secara negatif sebagai 'kondisi orang-orang

di mana koersi terhadap beberapa orang oleh beberapa orang yang lain dikurangi sebanyak mungkin dalam masyarakat.'[5]

Langkah yang lain dalam strategi ideologi ini adalah dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap 'demokrasi' dengan menjadikannya subordinat pada 'kebebasan'. Menurut Hayek, ide demokrasi merupakan hal sekunder ketimbang ide kebebasan individu, oleh karena itu pembelaan terhadap kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi menggantikan pembelaan terhadap kesetaraan yang merupakan nilai utama dalam masyarakat liberal. Menurut Hayek, 'demokrasi secara esensial berarti perangkat utilitarian untuk menjaga perdamaian internal dan kebebasan individu.'[6] Dia bersikukuh bahwa apabila terdapat konflik antara demokrasi dan kebebasan, maka yang perlu diprioritaskan adalah kebebasan dan demokrasi harus dikorbankan. Bahkan kemudian, Hayek lebih ekstrem lagi dengan menyarankan untuk menghapus demokrasi.

Thatcher menggunakan diskursus yang mempertentangkan, 'pembayar pajak' yang taat dengan para elite birokratik yang mengekang kebebasan pembayar pajak melalui penyalahgunaan kekuasaan negara, karenanya ia berhasil mengkonsolidasikan blok historis di sekeliling visi neoliberalnya dan mengubah secara drastis konfigurasi kekuatan sosial dan ekonomi. Namun, pada titik terten-

5 Friedrich Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hal. 11.

6 Friedrich Hayek, *The Road to Serfdom* (London: Routledge, 1944), hal. 52.

tu, politik Thatcher dianggap terlalu memecah belah oleh Tories dan, setelah memenangkan tiga pemilu, ketika penerapan pajak perseorangan *(poll tax)* pada 1989 menyebabkan pecahnya kekerasan jalanan, para politisi Partai Tories mendesak Thatcher untuk mengundurkan diri pada tahun 1990.

Meskipun demikian, pada saat itu, Margaret Thatcher telah berhasil mengunci revolusi neoliberalnya dan ketika dia meninggalkan pemerintahan, visi neoliberal telah begitu mendarah daging di benak publik, bahkan ketika Partai Buruh kembali berkuasa pada 1997 dengan sosok Tony Blair, tetap tidak mampu melawan hegemoni neoliberal. Memang, seperti yang diperlihatkan Hall, seseorang menemukan semua diskursus kunci Thatcher dalam diskursus Partai Buruh Baru *(New Labour)*:

> 'para pembayar pajak' (para pekerja keras yang dipajaki berlebihan untuk mendanai kesejahteraan 'pengemis') dan 'konsumen' (ibu rumah tangga beruntung dan 'bebas' melakukan pilihan terbatasnya di pasar yang 'pilihan' dan personalisasinya telah dirancang secara khusus). Tidak ada yang pernah berpikir menjadi warga negara yang membutuhkan atau bergantung pada layanan publik sekaligus.[7]

Tidak heran, beberapa tahun kemudian, ketika ditanyakan pencapaian terbaiknya, Margaret Thatcher menjawab: 'Tony Blair dan Partai Buruh Baru. Kita memaksa lawan kita untuk mengubah pemikiran mereka.'

[7] Stuart Hall, 'The Neoliberal Revolution', dalam *The Neoliberal Crisis*, ed. Sally Davison dan Katharine Harris (London: Lawrence & Wishart, 2015), hal. 25.

Ketundukan orang-orang 'Partai Buruh Baru' terhadap neoliberalisme diteorikan sebagai 'jalan ketiga', suatu bentuk politik yang 'melampaui fragmentasi kiri dan kanan' dan dicitrakan sebagai konsepsi paling maju dari 'politik progresif'. Saat ini, formasi hegemoni neoliberal tersebut telah berdiri kokoh. Kebutuhan akan batas politik antara 'kita' dan 'mereka' dianggap sebagai model politik usang dan 'konsensus sebagai pusat' dirayakan sebagai langkah menuju bentuk demokrasi matang di mana antagonisme telah teratasi. Konsensus terhadap model 'jalan ketiga' ini kemudian diadopsi sebagai kredo sosial-demokratik Eropa dan partai-partai sosialis. Menyusul runtuhnya model Uni Soviet, model 'jalan ketiga' ini menjadi satu-satunya visi yang diterima oleh kubu kiri demokratik, yang berarti menandakan transformasi penuh demokrasi sosial ke liberalisme sosial. Kondisi ini menciptakan ruang bagi pemerintahan pascapolitik yang menyediakan kondisi bagi konsolidasi hegemoni neoliberal di Eropa Barat.

Konsolidasi hegemoni neoliberal bersamaan dengan beberapa perubahan yang signifikan. Apabila ideologi Thatcherisme merupakan kombinasi antara isu konservatif Torisme dengan praktik ekonomi liberal, maka neoliberalisme yang menjadi hegemonik beberapa tahun belakangan ini berpaling dari ideologi konservatif tradisional. Untuk merespons transformasi dalam hal mode regulasi kapitalisme yang berhubungan dengan transisi dari Fordisme ke pasca-Fordisme, formasi hege-

moni neoliberal mengakomodir isu-isu budaya-tandingan *(counterculture)*. Dalam bukunya *The New Spirit of Capitalism*, Luc Boltanski dan Eve Chiapello menjelaskan cara di mana, dengan dihadapkan pada tantangan yang direpresentasikan oleh gerakan-gerakan baru, kapitalis berhasil menggunakan tuntutan-tuntutan otonomi gerakan tersebut dengan memanfaatkannya dalam perkembangan jaringan ekonomi pasca-Fordis dan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk kontrol baru.[8] Beberapa bentuk 'kritik artistik'—istilah dari Boltanski dan Chiapello untuk merujuk pada strategi estetik budaya-tandingan yang meliputi pencarian akan autentisitas, manajemendiri yang ideal, dan urgensi anti-hierarki—digunakan untuk mempromosikan kondisi-kondisi yang diprasyaratkan oleh mode baru regulasi kapitalis, yang menggantikan kerangka pendisiplinan pada periode Fordis. Cara ini menciptakan kondisi yang baik untuk mengooptasi dan menetralkan pelbagai tuntutan gerakan sosial baru ialah dengan menggunakan mereka untuk meliberalkan buruh dan mempromosikan individualisme yang rakus.

Beberapa pemikir kiri sangat kritis terhadap Boltanski dan Chiapello, menuding keduanya sebagai pihak yang mengajukan gerakan budaya-tandingan sehingga bertanggung jawab atas kemenangan nilai-nilai neoliberal. Interpretasi seperti ini berdasarkan pada pemahaman keliru atas pendekatan mereka yang sebenarnya justru, dari perspektif hegemonik, seperti yang saya tunjukkan

8 Luc Boltanski and Eve Chiapello, *The New Spirit of Capitalism* (London and New York: Verso, 2005).

dalam Agonistics, memperkenankan kita untuk memvisualisasikan transisi dari Fordisme ke pasca-Fordisme yang dalam istilah Gramsci disebut 'hegemoni melalui netralisasi' atau 'revolusi pasif'.[9] Dengan istilah tersebut, Gramsci merujuk pada situasi di mana pelbagai tuntutan yang menantang tatanan hegemonik dihidupkan kembali oleh sistem yang ada, memuaskan mereka dengan cara menetralkan potensi subversifnya. Berkat proses 'pembalikan' diskursus dan praktik kritik budaya-tandingan, kapital mampu melawan tantangan tersebut, bahwa tuntutan bisa saja terepresentasikan dalam legitimasi kapital dan untuk mengkonsolidasikan supremasinya.

Solusi tersebut berlaku untuk beberapa waktu, tetapi setelah beberapa tahun hegemoni yang tak terbantahkan tersebut, saat ini neoliberalisme sedang memasuki krisis, dan kemungkinan terbuka bagi kubu kiri untuk membangun tatanan hegemoni berbeda. Sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan dan untuk mengonsepsikan bagaimana melakukan intervensi terhadap krisis ini, saya mengusulkan untuk belajar dari strategi Thatcher. Mungkin ini tampak sebagai provokasi, tetapi saya bukanlah orang pertama yang mengusulkannya—walaupun dalam konteks yang berbeda, strategi ini juga diusulkan oleh Stuart Hall dalam bukunya *The Hard Road to Renewal*, di mana Hall menegaskan bahwa, berseberangan dengan Partai Buruh, Thatcher mampu mengembangkan proyek politik hegemonik dengan memainkan rangkaian strategi

9 Chantal Mouffe, *Agonistics: Thinking the World Politically* (London and New York: Verso, 2013).

sosial dan ekonomi yang berbeda tanpa mengabaikan dimensi ideologis.[10]

Krisis formasi hegemonik neoliberal akhir-akhir ini membuka kemungkinan intervensi untuk membangun tatanan yang berbeda. Kita harus mengikuti strategi Thatcher, mengadopsi strategi populis tetapi dengan tujuan progresif dan mengintervensi pelbagai sektor untuk membangun sebuah hegemoni baru yang bertujuan memulihkan dan memperdalam demokrasi. Momen populis membutuhkan jenis intervensi yang demikian.

Selagi krisis neoliberalisme menyediakan kesempatan untuk membangun sebuah tatanan hegemonik baru, tidak ada jaminan bahwa tatanan yang baru ini akan memberikan kemajuan demokratik secara signifikan dan bahkan mungkin bersifat otoriter. Inilah kenapa kebaruan ini krusial bagi kubu kiri untuk tidak mengulangi pelbagai kesalahan di masa lalu. Sangat penting bagi kubu kiri untuk melepaskan konsepsi politik esensialis yang mencegahnya dari memahami dimensi hegemonik dari politik.

Apa yang sangat dibutuhkan adalah strategi populis kiri yang bertujuan mengonstruksi 'rakyat', yakni kombinasi pelbagai perlawanan demokratik terhadap pascademokrasi untuk membangun formasi hegemonik menjadi lebih demokratik. Upaya ini akan memerlukan transformasi relasi kuasa besar-besaran dan pembentuk-

10 Stuart Hall, 'Learning from Thatcherism', dalam *The Hard Road to Renewal* (New York and London: Verso, 1988), hal. 271. 'Learning from Thatcherism' merupakan judul dari bab ini.

an praktik demokratik baru, tetapi saya berpendapat bahwa upaya tersebut tidak mensyaratkan pemutusan 'revolusioner' dengan rezim demokrasi-liberal. Tidak disangsikan bahwa terdapat orang-orang di kubu kiri yang akan menganggap kemungkinan seperti ini tidak dapat dilaksanakan. Tetapi saya menandang bahwa pengalaman Thatcherisme menunjukkan bahwa, dalam masyarakat Eropa, adalah mungkin untuk melakukan transformasi atas tatanan hegemonik yang ada tanpa menyingkirkan institusi-institusi demokrasi-liberal.

Belajar dari Thatcherisme berarti menyadari bahwa dalam krisis saat ini langkah yang harus dilakukan adalah membangun batas politik yang memutus konsensus pascapolitik antara kanan-moderat dengan kiri-moderat. Tanpa mendefinisikan lawan, serangan hegemonik tidak dapat dilakukan. Namun, justru langkah seperti ini yang tidak dapat dilakukan oleh partai-partai sosial-demokratik yang telah berpindah ke neoliberalisme. Alasannya karena partai sosial-demokratik percaya bahwa demokrasi harus mencapai konsensus dan mungkin menjalankan politik tanpa sebuah lawan *(adversary)*.

Strategi populis kiri harus menantang pandangan seperti itu, tetapi relasi kuasa hari ini jelas-jelas kurang menguntungkan ketimbang keadaan yang kita teliti dalam HSS. Selama tahun-tahun hegemoni neoliberal, banyak kemajuan sosial-demokratik berhasil dipereteli. Dan kita menyadari diri kita dalam situasi paradoks karena harus membela pelbagai institusi negara kesejah-

teraan yang kita kritik sebelumnya karena tidak cukup radikal.

Pada saat krisis konsensus pascaperang, sosial demokrasi, walaupun telah dilemahkan oleh pertumbuhan inflasi dan resesi ekonomi, belum terkalahkan secara ideologis. Dan, seandainya sosial demokrasi mampu merancang strategi hegemonik yang tepat, ia mungkin berhasil mempertahankan kemajuan sosialnya. Banyak nilai-nilai demokratik yang merupakan unsur utama sosial-demokratik masih memiliki kekuatan dan hal ini masih mungkin membayangkan proyek kiri melalui radikalisasi. Tentu saja radikalisasi bukan lagi persoalannya, tidak mungkin kita membayangkan untuk 'meradikalkan' neoliberalisme. Sekarang, sebelum mampu meradikalkan demokrasi, terlebih dahulu harus memulihkannya.

Keadaan saat ini memerlukan pemutusan dengan formasi hegemonik yang ada, dan hal inilah yang partai-partai sosial liberal tidak mampu lakukan. Partai-partai tersebut sudah terlalu terintegrasi dengan formasi hegemonik neoliberal dan diskursus reformis mereka tidak memperkenankan mereka untuk membuat batas politik dan membayangkan visi alternatif. Supaya partai-partai seperti itu bisa memberikan solusi atas krisis, dibutuhkan transformasi identitas dan strategi yang mendalam.

Sejak runtuhnya model Soviet, banyak sektor kiri tidak bisa membayangkan alternatif atas perspektif politik liberal selain daripada pekik revolusioner yang telah mereka campakkan. Pandangan mereka bahwa model politik

'kawan/lawan' tidak kompatibel dengan demokrasi pluralis dan demokrasi liberal bukanlah musuh yang perlu disingkirkan justru harus diapresiasi. Tetapi pandangan seperti ini menyebabkan mereka menegasikan keberadaan antagonisme sama sekali dan menerima konsepsi liberal yang mereduksi politik menjadi kompetisi antar para elite di ruang yang netral. Saya percaya bahwa ketidakmampuan untuk membayangkan strategi hegemonik adalah kelemahan utama partai-partai sosial-demokratik. Hal inilah yang menghalangi mereka dari memahami kemungkinan adversarial, suatu politik agonistik yang ditujukan untuk membangun tatanan hegemonik yang berbeda dalam kerangka liberal-demokratik.

Untungnya terdapat beberapa pengecualian yang, sebagaimana dibuktikan dengan evolusi Partai Buruh Inggris di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn, ia mengimplementasikan langkah yang sesuai dengan strategi populis kiri. Berlawanan dengan sektor Partai Buruh yang ingin mempertahankan model konsensus seperti provokasi Tony Blair, para pengikut Corbyn dan gerakan Momentum telah mengajukan pembentukan batas politik antara rakyat dan penguasa. Sangat jelas bahwa untuk kampanye elektoral akhir-akhir ini, mereka menggunakan slogan Blairite 'untuk orang banyak, bukan untuk segelintir orang' *(For the many, not the few)*, tetapi memaknai ulang dengan cara agonistik seperti pembentukan batas politik antara 'kita' dan 'mereka'.

Dengan melakukan pemutusan gamblang dengan pas-

capolitik kubu Blair, dan dengan merancang program radikal, Partai Buruh yang telah dipolitisasi ulang oleh Corbyn mampu memenangkan kembali banyak pemilih yang kecewa dan memikat banyak pengikut dari anak-anak muda. Kemenangan ini membuktikan kapasitas populisme kiri untuk memberikan impuls baru bagi politik demokratis.

Kenaikan signifikan dalam keanggotaan Partai Buruh di bawah kepemimpinan Corbyn juga mengindikasikan bahwa, berlawanan dengan klaim banyak ilmuwan politik, 'bentuk' partai belumlah usang dan ia bisa diaktivasi kembali. Tentu saja, Partai Buruh dengan hampir 600.000 anggota, sekarang menjadi partai sayap-kiri terbesar di Eropa. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang dialami oleh partai-partai politik dalam beberapa tahun terakhir merupakan konsekuensi dari kurangnya alternatif pascapolitik yang ditawarkan kepada warga negara, dan situasi ini berubah ketika mereka diberikan kemungkinan untuk mengetahui program radikalisasi demokrasi.

3

MERADIKALISASI DEMOKRASI

APA yang dimaksud dengan meradikalisasi demokrasi? Istilah ini yang perlu saya terangkan karena terdapat banyak konsepsi demokrasi dan banyak kesalahpahaman serius mengemuka berkenaan dengan 'demokrasi radikal dan plural' yang kami bela dalam HSS. Beberapa orang percaya bahwa kami menghendaki pemutusan total dengan demokrasi liberal dan pembentukan rezim yang sama sekali baru. Padahal, yang sebenarnya kami perjuangkan adalah 'radikalisasi' prinsip-prinsip etika politik rezim demokrasi-liberal: 'kebebasan dan kesetaraan untuk semua'.

Dimensi penting dari proyek ini adalah mempertanyakan keyakinan yang dianut oleh beberapa orang di kubu kiri bahwa untuk bergerak menuju masyarakat yang lebih adil, perlu melepaskan institusi-institusi demokrasi-liberal dan membangun *politeia* yang sama sekali baru,

suatu komunitas politik baru. Kami menegaskan bahwa, dalam masyarakat demokratik, kemajuan demokrasi penting dapat dilakukan melalui keterlibatan kritis dengan institusi-institusi yang ada.

Persoalan yang terjadi dengan masyarakat demokrasi modern, dalam pandangan kami, adalah prinsip-prinsip konstitutif berupa 'kebebasan dan kesetaraan untuk semua' tidak dipraktikkan. Tugas politik kiri adalah bukan menyingkirkan prinsip tersebut melainkan menemukan implementasi yang efektif. Oleh karena itu, 'demokrasi radikal dan plural' yang kita perjuangkan dapat dikonsepsikan sebagai radikalisasi atas institusi-institusi demokrasi yang ada, dengan hasil berupa prinsip kebebasan dan kesetaraan dapat berlaku efektif dalam meningkatkan kuantitas relasi sosial. Langkah ini tidak memerlukan pemutusan radikal-revolusioner, yang menyiratkan refondasi total. Sebaliknya, demokrasi radikal dan plural dapat dicapai dengan cara hegemonik, melalui kritik imanen yang memobilisasi sumber-sumber simbolik dari tradisi demokrasi.

Saya juga menganggap bahwa dalam mode kritik imanen inilah strategi populis kiri dapat turut serta untuk menantang pascademokrasi dan memulihkan sentralitas nilai-nilai demokrasi berupa kesetaraan dan kedaulatan rakyat. Mode intervensi seperti ini mungkin terjadi karena, meskipun terdegradasi oleh neoliberalisme, nilai-nilai demokrasi masih memainkan peran yang signifikan dalam imajinasi politik masyarakat kita. Lebih lanjut,

makna kritis dari nilai-nilai demokrasi tersebut dapat diaktifkan kembali untuk menumbangkan tatanan hegemoni dan membentuk tatanan hegemonik yang berbeda. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa banyak perlawanan terhadap kondisi pascademokrasi diekspresikan atas nama kesetaraan dan kedaulatan rakyat.

Meskipun tak ada keraguan bahwa kemunduran sosial dan politik saat ini disebabkan oleh kebijakan neoliberal, perlu dicatat bahwa sebagian besar protes tersebut tidak berupa penolakan langsung terhadap kapitalisme finansial dan neoliberalisme, tetapi berupa dakwaan terhadap elite penguasa yang dipandang telah memberlakukan kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri tanpa melakukan konsultasi publik.

Oleh karena itu, melalui bahasa demokrasi, banyak warga negara dapat mengartikulasikan protes mereka. Tidak diragukan lagi bahwa target utama dari gerakan seperti *movement of the squares* adalah kelemahan-kelemahan sistem politik dan institusi demokrasi. Gerakan tersebut tidak menyuarakan 'sosialisme', tetapi menyuarakan 'demokrasi sejati'. Ingat moto Indignados di Spanyol: 'Kita memiliki hak pilih, tetapi kita tidak mempunyai suara' *(We have a vote but we do not have a voice)*.

Menurut saya, mengimplementasikan strategi populis kiri dalam tradisi demokrasi merupakan langkah tepat karena membangun hubungan dengan nilai-nilai politik yang memang sentral bagi aspirasi-aspirasi politik.

Fakta bahwa banyak sekali perlawanan terhadap pelbagai bentuk opresi yang diekspresikan sebagai tuntutan demokrasi membuktikan peran krusial dimainkan oleh penanda 'demokrasi' dalam imajinasi politik. Tentu saja, penanda ini sering kali disalahgunakan, tetapi ia tidak kehilangan potensi radikalnya. Ketika digunakan secara kritis, dengan menekankan dimensi egalitariannya, penanda tersebut menjadi senjata yang kuat dalam perjuangan hegemonik untuk membentuk perspektif publik yang baru. Gramsci menyarankan cara seperti ini ketika dia menyatakan bahwa 'bukan tentang persoalan memperkenalkan dari awal suatu bentuk pemikiran sainstifik ke kehidupan individu setiap orang, tetapi tentang merenovasi dan membuat 'kritis' setiap aktivitas yang sudah ada.'[1]

Untuk mengetahui peranan diskursus demokratik dalam pembentukan subjektivitas politik, perlu kiranya memahami bahwa identitas politik bukanlah ekspresi langsung dari posisi objektif dalam tatanan sosial. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendekatan anti-esensialis dalam bidang politik. Sebagaimana ditegaskan dalam HSS, tidak ada yang natural atau pasti dalam perjuangan melawan relasi kuasa, maupun dalam bentuk perjuangan lain yang akan diambil.

Perjuangan melawan bentuk subordinasi bukanlah akibat langsung dari situasi subordinasi itu sendiri. Supaya relasi subordinasi dapat ditransformasikan menjadi

[1] Antonio Gramsci, *Prison Notebooks* (London: Lawrence & Wishart, 1971), hal. 330.

medan antagonisme, dibutuhkan keberadaan diskursus 'eksterior' yang darinya diskursus subordinasi dapat diinterupsi. Cara seperti ini yang membuat diskursus demokratik menjadi mungkin. Berkat diskursus demokratik inilah, yang menyediakan kosakata politik utama dalam masyarakat Barat, relasi subordinasi dapat dipersoalkan.

Kapan prinsip kebebasan dan kesetaraan menjadi acuan imajinasi demokratik? Perubahan penting dalam imajinasi politik masyarakat Barat terjadi pada saat yang oleh Tocqueville sebut 'revolusi demokratik'. Sebagaimana ditunjukkan oleh Claude Lefort, momen yang menentukan bagi 'revolusi demokratik' adalah Revolusi Prancis dengan afirmasinya pada keabsolutan kekuasaan rakyat. Afirmasi tersebut menimbulkan model simbolik baru dari pelbagai institusi sosial yang memutus kerangka teologi-politik dan *Declaration of the Rights of Man*, sehingga tersedia kosa kata untuk mempertanyakan pelbagai bentuk ketidaksetaraan yang dianggap tidak absah.[2] Tocqueville melihat karakter subversif dari apa yang dia sebut 'hasrat akan kesetaraan' *(passion for equality)* ketika dia menulis:

> Mustahil untuk percaya bahwa kesetaraan pada akhirnya tidak akan merambah dunia politik sebanyak ke domain lainnya. Tak mungkin untuk membayangkan manusia sebagai orang yang selamanya tidak setara di antara mereka sendiri dalam satu titik tertentu, dan setara dalam ti-

[2] Claude Lefort, *Democracy and Political Theory*, terj. David Macey (Cambridge, UK: Polity Press, 1988), bab 1.

> tik lain; pada momen lain, mereka akan menjadi setara dalam segala titik.[3]

Tentu saja, sebagai seorang aristokrat, Tocqueville tidak sedang merayakan datangnya era baru, tetapi dia sadar akan keniscayaan datangnya era baru tersebut. Dan apa yang dia prediksi terbukti benar. Dari kritik terhadap politik ketidaksetaraan tersebut, 'hasrat akan kesetaraan' ini memicu, melalui diskursus sosialis yang berbeda-beda dan pelbagai perjuangan yang dilakukan, untuk mempersoalkan ketidaksetaraan ekonomi, sehingga membuka babak baru bagi revolusi demokratik. Dengan perkembangan 'gerakan sosial baru', suatu babak lanjutan terbuka, suatu babak di mana kita tinggali saat ini dicirikan dengan mempersoalkan pelbagai bentuk ketidaksetaraan.

Uniknya, setelah lebih dari 200 tahun, kekuatan imajiner demokrasi masih berlaku, mendorong pencarian akan kesetaraan dan kebebasan dalam pelbagai domain baru. Namun, hal ini seharusnya tidak membuat kita percaya bahwa kita sedang menyaksikan evolusi linier dan tak terhindarkan menuju masyarakat setara, seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh tindak kejahatan Barat selama beberapa abad terakhir. Selain itu, seperti yang telah saya tunjukkan, kebebasan dan kesetaraan tidak pernah bisa terekonsiliasi secara sempurna dan keduanya selalu berada dalam ketegangan.

---

3 Alexis de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, vol. 1 (Paris: Flammarion, 1981), hal. 115.

Lebih penting lagi, keduanya hanya eksis dalam pelbagai formasi hegemonik yang berbeda-beda, dengan interpretasi-interpretasi tertentu, di mana makna keduanya dapat dikontestasikan. Formasi hegemonik adalah konfigurasi praktik sosial terhadap pelbagai ranah yang berbeda-beda: ekonomi, budaya, politik, dan hukum, yang artikulasinya dijamin di sekeliling beberapa penanda simbolik kunci yang membentuk 'pendapat umum' dan memberikan kerangka normatif dari masyarakat yang terberi. Tujuan perjuangan hegemonik meliputi mendisartikulasi praktik hegemonik yang ada, melalui transformasi atas praktik tersebut dan memperbarui praktik hegemonik baru, membangun titik sentral *(nodal points)* dari formasi sosial hegemonik baru. Proses ini berfungsi sebagai langkah yang diperlukan dengan reartikulasi penanda-penanda hegemonik dan mode institusionalisasi. Mengartikulasikan demokrasi dengan hak-hak kesetaraan secara jelas, apropiasi sosial terhadap alat-alat produksi dan kedaulatan rakyat akan menimbulkan politik yang sangat berbeda dan memberikan praktik sosial-ekonomi yang berbeda daripada ketika demokrasi diartikulasikan dengan pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan individualisme yang tidak terkekang. Kita telah menyaksikan bagaimana transisi hegemonik menuju neoliberalisme, Margaret Thatcher berhasil, berkat kapasitasnya dalam menguraikan artikulasi sosial-demokrat perihal kebebasan dan kesetaraan, mempromosikan pemahaman baru tentang nilai-nilai tersebut sehingga memungkinkan dia

untuk mengimplementasikan proyek neoliberalnya.

Untuk memahami apa yang diperjuangkan dalam transisi dari satu formasi hegemonik ke formasi hegemonik yang lain, perlu kiranya melakukan distingsi metodologis antara dua level analisis: prinsip-prinsip etiko-politik dari *politeia* liberal-demokratik dan pelbagai bentuk hegemoninya. Pembedaan semacam ini sangatlah penting bagi politik demokrasi karena, dengan menyingkap pelbagai formasi hegemonik yang kompatibel dengan suatu bentuk masyarakat liberal-demokratik, membantu kita untuk menggambarkan perbedaan antara transformasi hegemonik dan retakan revolusioner.

Masyarakat demokrasi-liberal mengandaikan adanya tatanan kelembagaan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip etiko-politik yang membentuk legitimasi prinsip-prinsip tersebut. Tetapi hal ini membuka banyak cara di mana prinsip-prinsip tersebut diartikulasikan dan diinstitusionalisasikan dalam formasi hegemonik yang spesifik. Perjuangan dalam transformasi hegemonik adalah pembentukan suatu blok historis baru berdasarkan pada artikulasi yang beragam antara prinsip-prinsip politik yang membentuk rezim demokrasi-liberal dan praktik-praktik sosial-ekonomi di mana keduanya diinstitusionalisasikan. Dalam konteks transisi dari satu tatanan hegemonik ke tatanan hegemonik yang lain, prinsip-prinsip politik tersebut tetap berlaku tetapi keduanya diinterpretasikan dan diinstitusionalisasikan dengan cara yang berbeda. Hal inilah yang tidak berlaku dengan ‘revolusi’ yang

dipahami sebagai pemutusan total dengan rezim politik dan pengadopsian prinsip-prinsip legitimasi yang sama sekali baru.

Strategi populisme kiri berusaha membangun tatanan hegemonik baru dalam kerangka demokrasi-liberal yang konstitusional dan populisme kiri tidak bertujuan untuk melakukan pemutusan radikal dengan demokrasi liberal pluralis ataupun pembangunan tatanan politik yang sepenuhnya baru. Tujuan dari populisme kiri adalah pembentukan suatu kehendak kolektif, 'rakyat' yang berusaha mewujudkan formasi hegemonik baru untuk membangun kembali artikulasi antara liberalisme dan demokrasi yang telah disingkirkan oleh neoliberalisme, dengan menempatkan nilai-nilai demokrasi pada peran utama. Proses memulihkan dan meradikalkan institusi-institusi demokrasi, tidak diragukan lagi, akan mencakup momen-momen keterpecahan dan konfrontasi dengan kepentingan ekonomi dominan, tetapi proses ini tidak memerlukan pelepasan prinsip-prinsip legitimasi demokrasi-liberal.

Strategi hegemoni semacam itu melibatkan institusi-institusi politik yang ada dalam rangka mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut melalui prosedur demokrasi dan menolak dilema palsu antara reformasi dan revolusi. Oleh karena itu, sangat jelas terdapat perbedaan baik dari strategi revolusioner 'ekstrem kiri' maupun dari reformisme mandul dari para sosial-liberal yang hanya mencari pergantian kekuasaan belaka dalam pemerintah-

an. Keduanya dapat disebut 'reformisme radikal' atau, mengikuti Jean Jaures, 'reformisme revolusioner' untuk mengindikasikan dimensi subversif dari reformasi tersebut dan fakta bahwa apa yang keduanya perjuangkan, walaupun melalui saluran demokrasi, adalah transformasi struktur relasi kuasa sosial-ekonomi secara mendalam.

Dalam spektrum apa yang biasanya dimengerti sebagai 'kiri', seseorang dapat membedakan tiga jenis politik. Pertama adalah 'reformisme murni' yang menerima baik prinsip-prinsip legitimasi demokrasi liberal maupun formasi sosial hegemoni neoliberal. Kedua adalah 'reformisme radikal' yang menerima prinsip-prinsip legitimasi tersebut tetapi berusaha mengimplementasikan formasi hegemonik yang berbeda. Ketiga adalah 'politik revolusioner' yang berusaha melakukan pemutusan total dengan tatanan sosial-politik yang ada. Berdasarkan kategori ketiga tersebut, kita menemukan tidak hanya politik Leninis tradisional tetapi juga tipe politik lain, seperti yang dimajukan oleh para anarkis atau penyokong 'pemberontakan' yang menolak total negara dan institusi-institusi demokrasi-liberal.

Watak dan peran negara merupakan titik sentral divergensi antara ketiga bentuk politik 'kiri' tersebut. Pandangan reformis murni melihat negara sebagai institusi netral yang perannya adalah untuk merekonsiliasikan kepentingan dari pelbagai kelompok sosial, politik revolusioner memandang negara sebagai institusi opresif yang harus dilenyapkan, sedangkan perspektif reformis

radikal mempersoalkan negara dalam cara yang berbeda. Dengan mengambil pandangan dari Gramsci, perspektif reformis radikal memahami negara sebagai kristalisasi relasi kuasa dan medan perjuangan. Negara bukanlah media yang homogen tetapi sekumpulan agen dan fungsi yang tak seimbang, secara relatif diintegrasikan oleh praktik-praktik hegemonik yang terjadi di dalamnya.

Salah satu kontribusi penting Gramsci terhadap politik hegemonik adalah konsepsinya tentang 'negara integral', yang mengandung arti sebagai masyarakat politik sekaligus masyarakat sipil. Pandangan ini tidak boleh dipahami sebagai 'negaraisasi' *(statization)* masyarakat sipil, melainkan indikasi dari karakter politik masyarakat sipil yang dipresentasikan sebagai medan perjuangan bagi hegemoni. Dalam pandangan ini, di samping aparat pemerintahan tradisional, negara juga tersusun dari pelbagai aparat dan ruang publik di mana berbagai kekuatan yang berbeda-beda saling berkontestasi untuk merebut hegemoni.

Dianggap sebagai latar bagi intervensi agonistik, ruang publik tersebut dapat menyediakan ruang bagi kemajuan demokrasi. Inilah mengapa strategi hegemonik harus melibatkan aparatur negara yang beragam tersebut supaya dapat mentransformasikannya, sehingga menjadikan negara sebagai kendaraan bagi pelbagai ekspresi tuntutan demokratik. Apa yang dipertaruhkan bukanlah 'melenyapkan' *(withering away)* negara dan lembaga-lembaga yang melaluinya pluralisme diorganisir, tetapi

transformasi mendalam dari lembaga-lembaga tersebut untuk melayani proses radikalisasi demokrasi. Tujuannya bukanlah *perebutan* kekuasaan negara, tetapi seperti yang dikatakan Gramsci, 'negara yang terus-menerus *menjadi*' *(becoming state)*.

Bagaimana memahami politik 'radikal' berdasarkan perspektif tersebut? Dalam arti tertentu, baik tipe politik revolusioner maupun politik hegemonik dapat disebut 'radikal' karena keduanya menghendaki suatu bentuk pemutusan dengan tatanan hegemonik yang ada. Namun, pemutusan ini tidak memiliki sifat yang sama dan tidak tepat untuk menempatkan keduanya dalam kategori yang sama dengan label 'ekstrem kiri' seperti yang sering terjadi.

Bertentangan dengan apa yang kerap kali diklaim, strategi populis kiri bukanlah ikon dari 'ekstrem kiri' melainkan cara berbeda dalam melihat pemutusan dengan neoliberalisme melalui pemulihan dan radikalisasi demokrasi. Langkah mutakhir oleh para pembela *status quo* yang melabeli semua kritik terhadap neoliberalisme sebagai 'ekstrem kiri', dan memandang 'ekstrem kiri' tersebut sebagai bahaya bagi demokrasi, merupakan upaya tidak jujur untuk menghalangi segala jenis penentangan terhadap tatanan hegemoni yang ada. Seolah-olah pilihannya terbatas pada menerima formasi hegemoni neoliberal sebagai satu-satunya bentuk demokrasi liberal yang absah atau sama sekali menolak demokrasi liberal.

Menarik untuk dicatat bahwa kita menemukan dilema

yang sama pada mereka yang berada di kubu kiri yang menegaskan bahwa radikalisasi demokrasi memerlukan pelepasan demokrasi liberal. Dalam beberapa kasus, dilema yang keliru ini muncul dari kebingungan terhadap institusi politik demokrasi liberal dan mode produksi kapitalis. Meskipun benar bahwa artikulasi semacam ini yang secara historis kita temui sejauh ini, tetapi artikulasi tersebut bersifat kontingen.

Meskipun banyak teoretikus liberal mengklaim bahwa liberalisme politik mengharuskan liberalisme ekonomi dan masyarakat demokratik mensyaratkan ekonomi kapitalis, tetapi yang jelas tidak ada hubungan yang mutlak antara kapitalisme dan demokrasi liberal. Yang patut disayangkan adalah Marxisme berkontribusi pada kebingungan ini dengan menganggap demokrasi liberal sebagai superstruktur kapitalisme. Sangat disesalkan bahwa pendekatan ekonomistik seperti ini masih diterima di beberapa kalangan kiri yang menyerukan penghancuran terhadap negara liberal. Dalam kerangka prinsip-prinsip konstitutif negara liberal—pembagian kekuasaan, hak pilih universal, sistem multipartai dan hak-hak sipil—dimungkinkan untuk memajukan seluruh tuntutan demokrasi saat ini. Perjuangan melawan pascademokrasi tidaklah berupa penyingkiran terhadap prinsip-prinsip tersebut, melainkan mempertahankan dan meradikalkan prinsip tersebut.

Gagasan ini bukan berarti menerima tatanan kapitalis sebagai satu-satunya kemungkinan, meskipun tetap

dalam kerangka politik demokrasi-liberal, politik reformisme radikal yang saya perjuangkan tidak berarti dilarang menantang relasi produksi kapitalis. Inilah mengapa penting untuk membedakan antara liberalisme politik dan liberalisme ekonomi.

Proses radikalisasi demokrasi harus mencakup dimensi anti-kapitalis karena banyak bentuk subordinasi yang perlu ditentang merupakan konsekuensi dari relasi produksi kapitalis. Namun, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa kelas pekerja memiliki peran istimewa yang *a priori* dalam perjuangan anti-kapitalis. Terdapat banyak simpul antagonisme antara kapitalisme dan pelbagai sektor kehidupan masyarakat, dan hal ini berarti bahwa, ketika perjuangan ini dipandang sebagai perluasan prinsip-prinsip demokrasi, akan ada bermacam-macam perjuangan anti-kapitalis. Dalam beberapa kasus, pelbagai perjuangan tersebut bahkan mungkin tidak dianggap sebagai perjuangan 'anti-kapitalis' oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya dan banyak perjuangan yang dilakukan atas nama kesetaraan dan dipahami sebagai perjuangan untuk demokrasi.

Orang-orang tidak melawan 'kapitalisme' sebagai entitas abstrak karena mereka percaya pada 'hukum sejarah' menuju sosialisme. Justru selalu atas dasar situasi konkret itulah yang membuat mereka tergerak untuk bertindak. Apabila mereka berjuang untuk kesetaraan, karena perlawanan mereka terhadap pelbagai bentuk dominasi diinspirasi oleh nilai-nilai demokrasi dan me-

lalui nilai-nilai tersebut, dengan mengafirmasi aspirasi dan subjektivitas mereka dan bukan atas nama anti-kapitalisme, orang-orang dapat dimobilisasi. Bahkan seorang Marxis seperti David Harvey akan setuju dengan perspektif ini; seperti yang dituliskan oleh Harvey: 'Watak neoliberalisme yang sangat anti-demokrasi dan didukung otoritarianisme neokonservatif inilah yang harus menjadi fokus utama perjuangan sosial.'[4]

Kesalahan fundamental dari 'ekstrem kiri' adalah selalu mengabaikan pandangan tersebut. Para 'ekstrem kiri' tidak mengamati bagaimana orang-orang dalam kenyataan, tetapi bagaimana mereka harus sesuai dengan teori mereka. Sehingga, mereka memandang peran mereka adalah membuat orang-orang menyadari 'kebenaran' tentang situasinya. Alih-alih menunjuk lawan dengan cara di mana orang-orang dapat mengidentifikasinya, para ekstrem kiri menggunakan kategori abstrak seperti kapitalisme, sehingga mereka gagal memobilisasi dimensi afektif yang diperlukan untuk mendorong orang-orang supaya bertindak politis. Mereka sebenarnya tidak peka terhadap tuntutan orang-orang. Retorika anti-kapitalis mereka tidak menemukan gaung dalam pelbagai kelompok yang kepentingannya pura-pura mereka wakili. Inilah kenapa mereka selalu berada dalam posisi marginal.

Tujuan strategi populis kiri adalah pembentukan mayoritas rakyat untuk merebut kekuasaan dan membangun suatu hegemoni yang progresif. Tidak ada strategi

[4] David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University Press, 2005).

mutlak *(blueprint)* perihal bagaimana hal ini akan terjadi atau berakhir. Rantai ekuivalensi yang melaluinya 'rakyat' akan dikonstruksikan bergantung pada keadaan historis. Dinamikanya tidak dapat ditentukan secara terpisah dari semua referensi kontekstual.

Hal yang sama berlaku untuk suatu bentuk hegemoni baru yang ingin diwujudkan oleh strategi populis kiri ini. Yang menjadi persoalan bukanlah pembangunan 'rezim populis' dengan program-program yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi pembentukan formasi hegemonik yang akan mempercepat pemulihan dan pendalaman demokrasi. Hegemoni ini akan menggunakan nama yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Hegemoni ini bisa dikonsepsikan sebagai 'sosialisme demokratik', 'ekososialisme', 'demokrasi asosiatif' atau 'demokrasi partisipatoris'; semuanya bergantung pada konteks dan tradisi nasionalnya masing-masing.

Apapun namanya, yang penting adalah pengakuan bahwa 'demokrasi' menjadi penanda hegemonik yang di sekelilingnya beragam perjuangan diartikulasikan dan liberalisme politik tidak disingkirkan. Istilah yang tepat bisa berupa 'sosialisme liberal' yang dengan istilah ini, Norberto Bobbio merujuk pada formasi sosial yang mengombinasikan institusi-institusi demokrasi-liberal dan kerangka ekonomi dengan beberapa karakter sosialis.

Memahami sosialisme sebagai demokratisasi negara dan ekonomi, Bobbio menegaskan dalam beberapa karyanya di mana dia membahas artikulasi antara sosialisme

dan demokrasi liberal yang hasilnya berupa sosialisme demokratik harus mengandung nilai-nilai liberal.[5] Dengan menggambarkan tujuan sosialisme sebagai upaya memperdalam nilai-nilai demokrasi liberal, Bobbio bersikukuh bahwa untuk merealisasikan tujuan tersebut tidak mensyaratkan pemutusan dengan pemerintahan konstitusional dan aturan hukum. Dia dengan tegas membela ide bahwa tujuan-tujuan sosialis dapat diwujudkan dalam kerangka demokrasi liberal, dengan bersikeras bahwa tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dalam kerangka seperti itu.

Digambarkan dengan cara seperti itu, proyek radikalisasi demokrasi berbagi beberapa karakteristik dengan demokrasi sosial sebelum terjadi konversi ke liberalisme sosial, tetapi hal ini bukan sekedar kembali ke model pascaperang yang mengompromikan kapital dengan buruh. Perbandingan semacam ini tidak akan berlaku lagi. Selain keharusan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan demokratik baru, pembelaan terhadap isu lingkungan menjadi salah satu alasan mengapa kembali ke model pascaperang tidaklah mungkin dilakukan. Dengan mengedepankan tuntutan konsumen dan pertumbuhan ekonomi, solusi Keynesian menjadi motor penggerak kerusakan lingkungan. Seperti yang akan saya utarakan dalam bab berikutnya, untuk menghadapi tantangan krisis ekologi, proyek demokrasi radikal harus mengartikulasikan

5 Lihat, misalnya, Norberto Bobbio, *The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game*, terj. Roger Griffin (London: Polity Press, 1987) dan *Which Socialism?: Marxism, Socialism and Democracy*, terj. Roger Griffin (London: Polity Press, 1987).

persoalan-persoalan ekologi dan sosial. Sebuah keharusan untuk mengonsepsikan suatu sintesis baru antara pelbagai konsep kunci demokrasi dan tradisi sosial di sekeliling pembangunan model baru ini.

Seperti yang telah saya tunjukkan di awal bab ini, terdapat banyak konsep demokrasi radikal, dan perbedaan dan ketidaksepakatan perihal konsep-konsep tersebut patut untuk dipertimbangkan. Ketidaksepakatan yang prinsipil antara definisi saya dan beberapa teoretikus yang lain menyangkut persoalan demokrasi representatif, yang kerap kali dianggap sebagai oksimoron oleh beberapa teoretikus demokrasi liberal. Misalnya, beberapa dari mereka mengklaim bahwa gerakan-gerakan protes yang kita saksikan beberapa tahun terakhir menandakan kematian demokrasi representatif dan menggambarkan kebutuhan akan demokrasi non-representatif, 'suatu demokrasi *in actu*'. Dalam buku *Agonistics*, saya telah mengkritik pandangan ini dan menyatakan bahwa kita tidak sedang menghadapi krisis demokrasi representatif *'per se'* tetapi krisis inkarnasi pascademokrasi.[6]

Krisis ini disebabkan oleh absennya konfrontasi agonistik dan solusinya tidak bisa dengan pembentukan demokrasi 'non-representatif'. Bertentangan dengan ide bahwa perjuangan ekstra-parlementer menjadi satu-satunya kendaraan untuk memajukan demokrasi, saya berpendapat bahwa, ketimbang strategi pembelotan dan eksodus yang dimajukan oleh Michael Hardt dan Antonio

6 Chantal Mouffe, *Agonistics: Thinking the World Politically* (London and New York: Verso, 2013), bab 6.

Negeri, apa yang dibutuhkan adalah strategi 'keterlibatan' dengan negara dan institusi-institusi representatif dengan tujuan melakukan perubahan mendasar.

Menarik untuk disimak bahwa dalam *Assembly*, Hardt dan Negri telah mengubah posisi mereka sehubungan dengan strategi eksodus. Sekarang keduanya mengungkapkan bahwa *Multitude* seharusnya tidak menempuh jalan eksodus dan pengambilalihan, tetapi keduanya menekankan pentingnya 'untuk merebut kekuasaan dengan cara yang berbeda'.[7] Arti dari pernyataan Hardt dan Negri tersebut tidak terlalu jelas dan dalam pelbagai hal kedua tampaknya tidak meninggalkan gagasan mereka bahwa *Multitude* dapat mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Apabila mereka saat ini mengakui peranan kepemimpinan, mereka berpendapat bahwa hal itu harus dibatasi pada soal pembuatan keputusan taktis, sementara yang strategis harus dipersiapkan untuk *Multitude*. Sebagaimana pernyataan mereka:

> 'Kepemimpinan' harus tetap menjadi subordinat dari *multitude*, ditugaskan dan diberhentikan sesuai kesempatan. Apabila para pemimpin masih dibutuhkan dan mungkin dalam konteks ini, itu hanya karena mereka melayani *multitude* yang produktif. Hal Ini bukanlah penghapusan kepemimpinan, tetapi pembalikan hubungan politik yang membentuknya, suatu pembalikan polaritas yang menghubungkan gerakan horizontal dan kepemimpinan vertikal.[8]

7 Michael Hardt dan Antonio Negri, *Assembly*, (New York: Oxford University Press, 2017), hal. 288.

8 *Ibid*., hal. xv.

Mereka mengklaim, berkat pembalikan tersebut, mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh semua jenis populisme, baik itu populisme kiri maupun populisme kanan, yang 'dicirikan oleh suatu paradoks utama: berbasa-basi terus-menerus kepada kekuatan rakyat, tetapi kendali penuh dan pengambilan keputusan dilakukan oleh sekelompok kecil politisi'.[9]

Inti dari perspektif Hardt dan Negri adalah gagasan tentang 'yang publik' *(the common)*, didefinisikan secara bertentangan dengan kepemilikan baik pribadi maupun publik, yang merupakan kunci utama dari pendekatan keduanya. Dalam hal ini, *Assembly* mengikuti analisis-analisis mereka sebelumnya dalam *Commonwealth*, di mana mereka berpendapat bahwa produksi bio-politik menciptakan kondisi bagi demokrasi *multitude* karena menghasilkan pelbagai bentuk subjektivitas ekonomi dan politik yang merupakan suatu ekspresi dari 'yang publik'. Ketika buruh semakin bertanggungjawab untuk menghasilkan kerja sama tanpa intervensi kapital, produksi bio-politik menyokongnya dengan kekuatan-kekuatan demokratik baru. Oleh karena itu, menurut mereka, suatu masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip 'yang publik' telah berkembang melalui proses informatisasi dan pengembangan kapitalisme kognitif.

Terlepas dari nilai analisis mereka tentang proses produktif, yang telah dikritik dari pelbagai sudut, yang menjadi problematik dalam perayaan mereka terhadap

9 *Ibid.*, hal. 23.

'yang publik' adalah gagasan bahwa 'yang publik' tersebut menjadi prinsip utama organisasi masyarakat. Persoalan utama dari perayaan terhadap 'yang publik' ini, yang ditemukan—meskipun dalam bentuk yang beragam—dalam karya para teoretikus adalah bahwa, dengan berlandaskan pada konsepsi multiplisitas yang bebas dari negativitas dan antagonisme, 'yang publik' tersebut tidak memberikan ruang pada pengakuan akan watak hegemonik dari tatanan sosial yang niscaya. Dalam konteks Hardt dan Negri, penolakan keduanya terhadap representasi dan kedaulatan bersumber dari ontologi imanensi yang jelas-jelas bertentang dengan hal yang melandasi konsepsi saya tentang demokrasi radikal.

Kritik terhadap representasi juga dapat ditemukan dalam perspektif lain untuk meradikalkan demokrasi. Dalam kasus ini, praktik pemilihan kuno dengan cara lotre, penyortiran, dimajukan oleh berbagai teoretikus sebagai solusi untuk mengatasi krisis representasi yang saat ini mempengaruhi masyarakat demokratis kita. Para penyokong praktik pemilihan kuno ini mengklaim bahwa demokrasi representatif dirancang untuk memisahkan rakyat dari kuasanya dan satu-satunya cara untuk membangun tatanan demokrasi yang sebenarnya adalah dengan meninggalkan model elektoral dan menggantinya dengan sistem lotre.[10]

Pandangan tersebut cacat karena mereduksi representasi menjadi sekadar pemilihan dan tidak memahami

[10] Lihat, misalnya, David Van Reybrouck, *Against Elections: The Case for Democracy*, terj. Liz Waters (London: Vintage, 2016).

peranan representasi dalam demokrasi pluralis. Masyarakat dipecah dan disaling-silangkan oleh relasi kuasa dan antagonisme, dan lembaga perwakilan memainkan peran penting dalam memungkinkan pelembagaan dimensi konfliktual ini. Misalnya, dalam demokrasi pluralis, partai politik memberikan kerangka diskursif yang memungkinkan orang-orang memahami dunia sosial di mana mereka berada dan mengetahui kesalahan-kesalahannya.

Apabila kita percaya bahwa kesadaran agen sosial bukan merupakan ekspresi langsung dari posisi 'objektif'-nya dan kesadaran tersebut selalu terbentuk secara diskursif, maka jelas bahwa subjektivitas politik akan dibentuk oleh pelbagai diskursus politik yang saling berkompetisi dan partai berperan penting dalam pengembangan subjektivitas tersebut. Partai memberikan penanda simbolik yang memungkinkan orang untuk menempatkan diri mereka di dunia sosial dan memberi makna pada pengalaman hidup mereka. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, ruang simbolik tersebut telah direbut oleh diskursus lain dengan pelbagai wataknya, dan kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat demokratis. Akibat kembalinya pascapolitik, partai kehilangan kekuatan untuk memainkan peran simbolik, tetapi situasi ini tidak lantas membuat kita menyimpulkan bahwa demokrasi dapat berjalan tanpa keberadaan partai. Seperti yang telah berulang kali saya kemukakan, suatu masyarakat demokratis yang plural—yang tidak memandang pluralisme dalam bentuk anti-politik yang

harmonis dan di mana kemungkinan antagonisme yang selalu ada diakui—tidak dapat eksis tanpa representasi.

Suatu pluralisme yang efektif mensyaratkan adanya konfrontasi agonistik antar pelbagai proyek hegemonik. Melalui representasi itulah subjek politik kolektif diciptakan; mereka tidak ada sebelumnya. Daripada berusaha mencari solusi atas krisis demokrasi dalam model seperti lotre, yang tidak memahami sifat kolektif dari subjek politik dan mendorong pelaksanaan demokrasi berdasarkan pada sudut pandang individual, hal yang mendesak adalah memulihkan dinamika agonistik yang bersifat konstitutif terhadap demokrasi. Alih-alih menjadi langkah tepat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, pemilihan dengan lotre justru mempromosikan visi politik sebagai medan di mana individu, yang tidak terbebani oleh relasi sosial yang konstitutif, akan mempertahankan opininya masing-masing.

Persoalan utama dari lembaga-lembaga perwakilan adalah tidak membolehkan konfrontasi agonistik antar pelbagai proyek masyarakat yang berbeda-beda dan menjadi prasyarat utama bagi terlaksananya demokrasi. Kurangnya konfrontasi agonistik inilah, bukan fakta representasi, yang merampas hak suara warga negara. Memperbaikinya bukan dengan menyingkirkan representasi, tetapi membuat institusi-institusi kita lebih representatif. Tentu saja, inilah tujuan dari strategi populis kiri.

4

PEMBENTUKAN KOALISI RAKYAT

KETIKA Ernesto Laclau dan saya menulis HSS, tantangan bagi politik sayap-kiri adalah memahami tuntutan-tuntutan pelbagai 'gerakan baru' dan perlunya mengartikulasikan tuntutan tersebut di samping tuntutan buruh yang lebih tradisional. Saat ini, pengakuan dan legitimasi atas tuntutan tersebut telah mengalami kemajuan yang signifikan dan banyak dari tuntutan tersebut telah terintegrasi dengan agenda gerakan kiri. Faktanya adalah bahwa situasi hari ini berseberangan dari yang kita kritik tiga puluh tahun lalu, dan tuntutan-tuntutan 'kelas pekerja' hari ini telah ditinggalkan.

Perbedaan lain antara neoliberalisme hari ini dan sebelumnya adalah ia merupakan cikal bakal bagi kemunculan banyak antagonisme baru, seperti yang muncul dari penyingkiran negara kesejahteraan, mempengaruhi pelbagai sektor kehidupan. Sebagian antagonisme tersebut

disebabkan fenomena yang oleh David Harvey disebut sebagai 'akumulasi dengan perampasan' *(accumulation by dispossession)*. Melalui istilah ini, Harvey mengacu pada sentralisasi kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang melalui pelbagai praktik neoliberalisme seperti privatisasi dan finansialisasi. Harvey menggarisbawahi kebaruan perjuangan yang memunculkan praktik-praktik tersebut:

> Akumulasi dengan perampasan mengharuskan serangkaian praktik yang sangat berbeda dari akumulasi melalui ekspansi tenaga kerja di sektor industri dan agrikultur. Yang terakhir, dapat mendominasi proses akumulasi kapital pada 1950-an dan 1960-an, memunculkan budaya oposisi (seperti tertanam dalam serikat buruh dan partai politik kelas buruh) yang menghasilkan liberalisme. Pada sisi lain, perampasan terfragmentasi dan bersifat partikular—privatisasi di sini, degradasi lingkungan di sana, krisis finansial akibat hutang di tempat lain.[1]

Dari perspektif teoretis yang lain, kemunculan antagonisme baru tersebut juga digarisbawahi oleh para teoretikus terkait efek dari bentuk pemerintahan biopolitik neoliberal yang meresap ke dalam semua lini kehidupan.

Tidak ada keraguan bahwa di bawah neoliberalisme, medan konflik meluas secara signifikan. Dalam arti kondisi ini memberikan kesempatan karena jumlah orang

[1] David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University Press, 2005), hal. 178.

yang terdampak oleh kebijakan neoliberal jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang biasanya dianggap sebagai pemilih kiri tradisional. Oleh karena itu, proyek radikalisasi demokrasi dapat menarik para konstituen yang sejauh ini tidak teridentifikasi dengan kubu kiri, dan berkat politik hegemonik yang tepat, lebih banyak orang bisa direkrut untuk membangun alternatif progresif ketimbang sebelumnya. Namun demikian, hal ini juga membuat artikulasi tuntutan demokratik dalam sebuah kehendak kolektif menjadi lebih kompleks karena kita sekarang sedang dihadapkan dengan keragaman dan heterogenitas yang lebih besar.

Tantangan bagi strategi populis kiri adalah menekankan kembali pentingnya 'persoalan sosial', dengan mempertimbangkan peningkatan fragmentasi dan keragaman 'buruh' tetapi juga kekhasan pelbagai tuntutan demokratik. Pertimbangan tersebut mensyaratkan pembentukan 'rakyat' di sekitar proyek yang mengatasi pelbagai bentuk subordinasi seperti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan eksploitasi, dominasi atau diskriminasi. Penekanan khusus harus juga diberikan kepada persoalan yang telah mendapatkan relevansi khusus dalam tiga puluh tahun terakhir dan juga persoalan yang mendesak hari ini: masa depan planet.

Mustahil membayangkan proyek radikalisasi demokrasi tanpa menjadikan 'persoalan ekologis' sebagai agenda utama. Maka penting untuk mengombinasikan isu ekologis dengan persoalan sosial. Tidak diragukan lagi, kom-

binasi ini akan membutuhkan perubahan besar dalam cara hidup kita dan berbagai macam perlawanan harus diatasi. Untuk meninggalkan model produktivis dan mengimplementasikan transisi ekologis akan memerlukan model Gramscian yang sebenarnya, 'reformasi intelektual dan moral'. Reformasi tentu saja tidak akan mudah, tetapi proyek ekologis yang ambisius dan terencana dengan baik dapat menawarkan visi atraktif tentang masa depan masyarakat demokrasi yang mungkin menarik beberapa sektor yang saat ini berada dalam blok hegemoni neoliberal.

Sering kali dikatakan bahwa perpecahan utama yang terjadi dalam masyarakat kita adalah antara mereka 'yang kalah' dan 'yang menang' dari globalisasi neoliberal, seolah kepentingan keduanya tidak dapat direkonsiliasikan. Patahan seperti ini memang ada dan terdapat antagonisme nyata antara dua kubu, sebuah antagonisme yang tidak dapat digambarkan secara sederhana sebagai konfrontasi antara kubu 99% dan golongan 1%. Meskipun demikian, saya percaya bahwa di antara sektor-sektor yang memperoleh manfaat dari model neoliberal, beberapa mungkin menyadari bahaya besar yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan dapat dimenangkan untuk proyek masyarakat yang akan menjamin masa depan manusia bagi keturunan mereka. Harapannya, dengan mengajukan perjuangan kontra-hegemonik melawan model neoliberal atas nama nilai-nilai demokrasi dan ekologi mungkin membantu untuk menyingkirkan blok historis

di mana neoliberalisme bercokol, sehingga mampu memperluas jangkauan kehendak kolektif demokratik yang radikal.

Saya menyadari bahwa di antara orang-orang yang mendukung radikalisasi demokrasi tidak menganggap perlu atau bahkan tertarik untuk mengartikulasikan pelbagai perjuangan ke dalam suatu kehendak kolektif. Faktanya, keberatan yang sering dilontarkan kepada strategi populis kiri adalah bahwa dengan mempertemukan bermacam-macam tuntutan demokratik ke dalam pembentukan suatu koalisi 'rakyat' akan menghasilkan subjek yang homogen, suatu subjek yang menegasikan pluralitas. Setiap usaha untuk menghasilkan subjek yang homogen harus ditolak karena hal ini akan menghilangkan kekhasan aneka perjuangan. Keberatan lain yang sedikit berbeda adalah 'rakyat' sebagai konsep yang dimajukan populisme sedari awal dipandang sebagai entitas homogen dan perspektif ini tidak kompatibel dengan pluralisme demokrasi.

Keberatan-keberatan tersebut berasal dari kegagalan (atau penolakan?) untuk memahami bahwa strategi populis kiri berlandaskan pada pendekatan anti-esensialis di mana 'rakyat' bukanlah rujukan empiris, tetapi konstruksi politik diskursif. Artikulasi performatifnya tidak eksis sebelumnya dan tidak dapat dipahami melalui kategori-kategori sosiologis. Kritik-kritik tersebut menyingkap kurangnya pemahaman terhadap operasi yang melaluinya rakyat dikonstruksikan. Karena kehendak kolektif

dibentuk melalui rantai ekuivalensi, maka rakyat bukanlah subjek homogen di mana semua perbedaan, entah bagaimana, direduksi menjadi satu kesatuan.

Kita tidak sedang berhadapan, seperti yang kerap kali diklaim, dengan 'massa' seperti yang dipahami oleh Gustave Le Bon, di mana semua perbedaan lenyap untuk membentuk kelompok yang sepenuhnya homogen. Sebagai gantinya, kita menemukan diri kita dalam sebuah proses artikulasi di mana ekuivalensi dibangun di antara pelbagai tuntutan dengan cara mempertahankan perbedaan internal antar kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Ernesto Laclau, 'tiap tuntutan individu secara konstitutif terbagi: pada satu sisi, tuntutan individu tersebut memiliki sifat partikular pada dirinya sendiri; pada sisi lain, ia terpaut, melalui hubungan ekuivalensial, dengan totalitas dari tuntutan-tuntutan yang lain.'[2]

Sebagaimana Laclau dan saya telah tekankan berulang kali, relasi ekuivalensi bukanlah penyatuan di mana semua perbedaan runtuh menjadi identitas, tetapi semua perbedaan masih tetap berlaku. Jika perbedaan semacam ini dihilangkan, maka jatuhnya bukan ekuivalensi tetapi suatu identitas sederhana. Hanya sejauh perbedaan demokratis bertentangan dengan pelbagai kekuatan atau diskursus yang meniadakan semuanya, perbedaan tersebut dapat saling menggantikan satu sama lain. Inilah kenapa pembentukan kehendak kolektif melalui rantai ekuivalensi menuntut keberadaan 'lawan' *(adversary)*.

[2] Ernesto Laclau, 'Populism: What's in a Name?', dalam *Populism and the Mirror of Democracy*, ed. Francisco Panizza (New York and London: Verso, 2005), hal. 37.

Langkah seperti ini diperlukan untuk menggambarkan batas politik yang memisahkan 'kita' dari 'mereka', yang memang penting dalam pembentukan koalisi 'rakyat'.

Saya ingin menekankan bahwa 'rantai ekuivalensi' bukan sekadar koalisi antar pelbagai subjek politik yang ada. Kita juga tidak berurusan dengan situasi di mana rakyat yang sudah terbentuk menghadapi lawan yang sudah ada sebelumnya. Rakyat dan batas politik yang menentukan lawannya melalui perjuangan politik, dan keduanya selalu rentan terhadap pengartikulasian ulang melalui intervensi kontra-hegemonik. Tuntutan-tuntutan demokratik yang hendak strategi populis kiri artikulasikan bersifat heterogen dan inilah mengapa tuntutan tersebut harus diartikulasikan dalam sebuah rantai ekuivalensi.

Proses artikulasi tersebut sangatlah penting karena keberadaan pelbagai tuntutan tersebut dalam rantai ekuivalensi yang membuat tuntutan-tuntutan individu memperoleh penanda politiknya. Yang penting bukanlah dari mana datangnya tuntutan itu, tetapi bagaimana tuntutan itu diartikulasikan dengan tuntutan lain. Seperti contoh dari populisme kanan yang membuktikan bahwa tuntutan-tuntutan untuk demokrasi bisa diartikulasikan dalam kosakata yang xenofobik dan secara otomatis tuntutan tersebut tidak memiliki karakter progresif. Hanya dengan terlibat dalam rantai ekuivalensi dengan tuntutan-tuntutan demokratik lain, seperti para imigran dan feminis, tuntutan tersebut memperoleh di-

mensi demokrasi radikal. Hal ini tentu saja juga berlaku untuk tuntutan dari perempuan, imigran atau kelompok lain yang didiskriminasi.

Kita seharusnya tidak menerima begitu saja bahwa terdapat pelbagai perjuangan yang secara inheren bersifat emansipatoris dan tidak dapat berorientasi pada tujuan yang berlawanan. Perkembangan mutakhir bentuk ekologi dengan karakteristik antidemokratik yang jelas harus dipandang sebagai suatu peringatan bahwa penolakan terhadap model neoliberal bukan jaminan kemajuan demokratik. Dengan ekologi, seperti dalam domain yang lain, persoalan artikulasi sangatlah menentukan dan inilah kenapa sangat penting untuk membangun hubungan antara persoalan ekologis dan persoalan sosial di sekitar identifikasi dengan proyek radikalisasi demokrasi.

Bagaimana menjelaskan identifikasi dengan demokrasi radikal dalam cara yang kongruen dengan klaim awal saya bahwa rantai ekuivalensi tidak menghasilkan subjek yang homogen? Untuk menjawab secara tepat pertanyaan tersebut mensyaratkan adanya konsepsi tentang agen sosial sebagai hal yang terkonstruksi dalam pelbagai diskursus yang spesifik yang berhubungan dengan pelbagai relasi sosial di mana agen-agen tersebut berada. Di antara relasi sosial tersebut, terdapat satu hal yang terkait dengan masuknya agen sosial dalam komunitas politik—yaitu posisinya sebagai 'warga negara'.

Hanya *sebagai* warga negara, seorang agen sosial me-

lakukan intervensi pada tingkat komunitas politik. Meskipun menjadi kategori sentral dalam demokrasi liberal pluralis, kewargaan dapat dipahami dalam pelbagai macam cara yang memiliki pelbagai konsepsi politik yang sangat berbeda-beda. Liberalisme memandang kewargaan sebagai sekadar status legal dan melihat warga negara sebagai individu yang mengemban hak-hak, yang bebas dari segala identifikasi dengan 'kita'. Namun, dalam tradisi demokrasi, kewargaan dikonsepsikan sebagai keterlibatan aktif dalam komunitas politik, yang berperan aktif sebagai bagian dari 'kita', sesuai dengan konsepsi dari kepentingan umum. Inilah mengapa mengajukan konsepsi demokrasi radikal tentang kewargaan merupakan kunci dalam melawan pascademokrasi.

Untuk mengembangkan konsepsi semacam itu, kita mungkin menemukan sumber inspirasi dalam tradisi kewargaan republikan dengan penekanannya pada partisipasi aktif dalam komunitas politik. Ketika direformulasikan dalam suatu cara yang memberikan ruang bagi pluralisme, republikanisme kewargaan dalam versi *'plebeian'* (rakyat jelata) yang diilhami oleh Machiavelli dapat berkontribusi untuk menegaskan kembali pentingnya tindakan kolektif dan nilai publik yang telah berada dalam kungkungan selama tahun-tahun hegemoni neoliberal.

Pandangan liberal dan demokrasi selalu berada dalam kondisi perselisihan tetapi, selama periode negara kesejahteraan Keynesian, individualisme liberal dikendalikan oleh praktik-praktik sosial-demokratik. Secara

umum, nalar publik sosial-demokrasi tetap bertahan, hingga digerogoti oleh serangan neoliberal. Kita telah melihat bagaimana di bawah Thatcherisme, warga negara digantikan oleh 'pembayar pajak', ide politik kebebasan diartikulasikan bersama dengan ide ekonomi pasar bebas dan demokrasi direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral. Pertarungan krusial dalam perjuangan kontra-hegemoni melawan hegemoni neoliberal adalah berupa memaknai ulang yang 'publik' sebagai domain di mana warga negara dapat bersuara dan melaksanakan hak-haknya, menggantikan konsepsi individualistik dan dominan saat ini tentang warga negara sebagai 'konsumen' yang merupakan konsep sentral dari visi pascademokrasi.

Dalam buku *The Return of the Political*,[3] saya mengajukan konsepsi kewargaan sebagai 'tata laku' *(grammar of conduct)* yang diperintah oleh prinsip-prinsip etika politik dari *politeia* demokrasi liberal: kebebasan dan kesetaraan untuk semua. Karena prinsip-prinsip tersebut dapat diinterpretasikan dalam pelbagai cara yang berbeda-beda, terdapat banyak cara di mana seseorang dapat mengidentifikasi dan bertindak sebagai warga negara demokratik. Konsepsi kewargaan sosial-demokratik, misalnya, mengistimewakan perjuangan untuk hak-hak sosial dan ekonomi, sementara interpretasi demokrasi radikal menyoroti banyaknya relasi sosial lain di mana relasi dominasi eksis dan harus ditantang untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan.

[3] Chantal Mouffe, *The Return of the Political* (New York and London: Verso, 1993), bab 4.

Dengan dipahami sebagai yang menyediakan identifikasi bersama bagi orang-orang yang terlibat dalam perjuangan demokratik yang beragam, konsepsi radikal demokrasi perihal kewargaan dapat menjadi lokus konstruksi 'rakyat' melalui rantai ekuivalensi. Dengan mengidentifikasi sebagai warga negara yang tujuan politiknya adalah radikalisasi demokrasi merupakan hal yang akan menyatukan agen-agen sosial, yang mungkin terlibat dalam banyak perjuangan berbeda-beda tetapi 'tata laku'-nya, ketika bertindak sebagai warga negara, diatur oleh prinsip-prinsip etiko-politik kebebasan dan kesetaraan untuk mencakup relasi sosial yang luas.

Di samping persoalan agen sosial yang berada dalam relasi sosial spesifik—di mana perjuangan-perjuangan interseksional untuk kebebasan dan kesetaraan bertempat— terdapat persoalan-persoalan lain yang memerlukan pergerakan bersama dalam rangka mentransformasikan negara, yang sangat penting untuk formulasi proyek demokrasi radikal. Banyak tujuan-tujuan egalitarian, misalnya dalam ranah pendidikan, hanya dapat dicapai berkat intervensi negara. Intervensi ini tidak boleh dipandang dengan cara birokratik ataupun otoritarian, peran negara harus menyediakan kondisi bagi warga negara untuk mengambil alih ruang publik dan mengelolanya secara demokratis.

Dengan mengartikan kewargaan sebagai 'tata laku' politik menunjukkan bahwa mungkin untuk menjadi bagian dari 'rakyat' yang teridentifikasi dengan proyek

demokrasi radikal, sementara pada saat yang bersamaan berada dalam pluralitas relasi sosial yang lain dengan pelbagai 'subjektivitas' khasnya. Dalam rangka bertindak *sebagai* warga negara pada level politik untuk meradikalkan demokrasi tidak berarti menghilangkan bentuk-bentuk identifikasi lain, kewargaan ini sangat kompatibel dengan keterlibatan dalam perjuangan-perjuangan demokratik yang lebih tepat. Memang, kewargaan demokrasi radikal mendorong pluralitas keterlibatan semacam itu. Inilah mengapa strategi populis kiri mengharuskan artikulasi antara pelbagai intervensi pada level 'vertikal' dan 'horizontal' di dalam lembaga perwakilan serta di berbagai asosiasi dan gerakan sosial. Hal ini juga bertujuan untuk membangun sinergi antara praktik-praktik di mana berbagai bentuk dominasi ditantang dan praktik-praktik yang sedang bereksperimen dengan bentuk kehidupan egalitarian yang baru.

Sebagai contoh, orang-orang yang terlibat *sebagai* warga negara dalam proyek politik Podemos atau La France Insoumise akan melakukan intervensi ke dalam pelbagai lembaga perwakilan, sembari juga terlibat dalam bermacam-macam perjuangan dan praktik demokratik yang fokus pada persoalan lebih spesifik. Untuk menjadi bagian dari 'kita' warga negara demokrasi radikal tidak menghalangi partisipasi dalam jenis 'kita' yang lain.

Namun, terdapat suatu poin yang harus dijelaskan di sini. Peluasan medan praktik kewargaan yang saya ma-

jukan tidak menyiratkan semua keputusan demokratik dibuat oleh agen-agen sosial dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Hal ini penting untuk membedakan antara persoalan-persoalan yang menjadi perhatian agen-agen sosial sebagai anggota komunitas politik dan yang berkaitan dengan relasi sosial yang lain dan menyangkut komunitas tertentu. Jika tidak, kemungkinan akan berakhir dengan pandangan totalisasi yang menegasikan pluralisme yang sangat penting bagi konsepsi demokrasi radikal yang menghormati nilai kebebasan.

Konsepsi kewargaan demokrasi radikal yang saya usulkan terkait erat dengan politik reformis radikal yang memiliki keterlibatan dengan pelbagai institusi yang saya perjuangkan di awal. Hal ini tampak negara sebagai latar penting dalam politik demokratik karena negara membentuk ruang di mana warga negara dapat membuat keputusan tentang organisasi komunitas politik. Di sinilah kedaulatan rakyat dapat diimplementasikan. Namun, hal ini memerlukan adanya kondisi bagi konfrontasi agonistik dan inilah mengapa sangat diperlukan untuk memutus konsensus pascapolitik neoliberal.

Berlawanan dengan keyakinan para liberal, negara bukanlah medan netral. Negara selalu terstruktur secara hegemonik dan ia membentuk ruang yang penting bagi perjuangan kontra-hegemoni. Meskipun demikian, negara bukan satu-satunya ruang intervensi, dan oposisi antara partai dan gerakan, atau antara perjuangan parlementer dan ekstra-parlementer harus ditolak. Ber-

dasarkan model demokrasi agonistik, terdapat banyak ruang publik agonistik di mana orang-orang harus melakukan intervensi untuk meradikalkan demokrasi. Ruang politik tradisional parlemen bukanlah satu-satunya tempat pengambilan keputusan politik dan, ketika lembaga perwakilan harus mempertahankan, atau mendapatkan kembali, suatu peran yang menentukan, bentuk-bentuk baru partisipasi demokrasi diperlukan untuk meradikalisasi demokrasi.

Dalam bab sebelumnya, pendapat saya berlawanan dengan konsepsi demokrasi radikal yang murni horizontalis, tetapi hal ini tidak berarti saya mendukung demokrasi representatif dalam bentuknya yang sekarang. Proyek radikalisasi demokrasi yang saya majukan membutuhkan kombinasi dari pelbagai bentuk partisipasi demokratik yang berbeda-beda, yang bergantung pada ruang dan relasi sosial di mana kebebasan dan kesetaraan harus diimplementasikan. Kita bisa membayangkan artikulasi dari pelbagai bentuk representasi dan mode pemilihan perwakilan. Bentuk demokrasi langsung mungkin cocok dalam beberapa kasus dan model partisipatif mungkin dalam kasus yang lain. Walaupun saya kritis terhadap demokrasi langsung atau lotre, ketika dipandang sebagai mode pengambilan keputusan politik yang eksklusif, saya tidak memiliki persoalan dengan memberikannya ruang dalam kasus tertentu, dalam hubungannya dengan lembaga perwakilan. Terdapat banyak cara untuk meningkatkan demokrasi representatif dan membuatnya

menjadi lebih akuntabel. Berkenaan dengan idea tentang 'yang publik', walaupun saya menemukan ketidaktepatan 'yang publik' sebagai prinsip umum dari organisasi masyarakat, saya menganggap dalam beberapa domain praktik-praktik 'kepublikan' memainkan peran penting dalam memerangi proses privatisasi barang yang, seperti air, harus dianggap sebagai bagian dari milik 'publik'. Sejauh model politik yang dimajukan mengakui fakta bahwa masyarakat terbagi dan setiap tatanan tersusun secara hegemonik, maka terdapat banyak kemungkinan konfigurasi prosedur demokrasi yang dimungkinkan.

Pada pemikiran sebelumnya tentang kewargaan, saya ingin menambahkan bahwa operasi hegemonik dalam membentuk koalisi rakyat memerlukan prinsip yang artikulatif untuk menghubungkan dalam suatu rantai ekuivalensi dari pelbagai tuntutan demokratik yang membentuk kehendak kolektif. Prinsip yang artikulatif ini akan bervariasi sesuai dengan kondisi krisis yang berbeda-beda dan dapat disediakan baik oleh tuntutan demokrasi tertentu yang menjadi simbol perjuangan bersama untuk radikalisasi demokrasi, atau oleh sosok seorang pemimpin.

Peranan pemimpin dalam strategi populis selalu menjadi subjek kritisisme dan hal ini menjadi alasan mengapa gerakan-gerakan populis tersebut dituduh sebagai otoritarian. Banyak orang menjumpai kepemimpinan karismatik sangat berbahaya dan tidak ada keraguan hal ini memiliki efek negatif. Tetapi terlepas dari fakta bahwa sangat sulit menemukan contoh dari pelbagai gerakan

politik yang signifikan tanpa pemimpin yang menonjol, tidak ada alasan untuk menyamakan kepemimpinan yang kuat dengan otoritarianisme. Segala sesuatu bergantung pada jenis relasi yang dibangun antara pemimpin dan rakyat. Dalam kasus populisme sayap-kanan, yang ada adalah relasi sangat otoritarian di mana segala sesuatu berasal dari atas tanpa partisipasi akar rumput yang nyata.

Tetapi pemimpin dapat dikonsepsikan sebagai *primus inter pares* dan sangat mungkin untuk membangun jenis relasi berbeda, yang kurang vertikal *(top-down)* antara pemimpin dan rakyat. Apalagi, seperti yang akan saya terangkan setelah ini, kehendak kolektif tidak dapat dibentuk tanpa beberapa bentuk kristalisasi atas afeksi bersama, dan ikatan afeksi dengan pemimpin karismatik memainkan peranan penting dalam proses ini.

Kritisisme lain yang sering dialamatkan kepada strategi populis kiri adalah peranan atribusi pada dimensi nasional. Hal ini menimbulkan serangkaian pertanyaan, seperti keanggotaan Uni Eropa, yang melampaui cakupan buku ini, tidak peduli dengan pelbagai kebijakan spesifik tetapi hanya peduli dengan jenis strategi yang tepat, dalam kondisi krisis saat ini, untuk mewujudkan suatu kolektif yang bertujuan melakukan transformasi hegemonik. Ketika transformasi seperti ini terjadi, maka kondisi yang tersedia bagi perdebatan agonistik tentang pelbagai kebijakan lebih cocok untuk meradikalisasi demokrasi dan jawaban-jawabannya tidak boleh ditentukan

terlebih dahulu.

Apa yang hendak saya tekankan adalah bahwa perjuangan hegemonik untuk memulihkan demokrasi harus dimulai pada level negara bangsa, yang meskipun kehilangan keistimewaannya, masih merupakan salah satu ruang penting untuk pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di level nasional inilah, pertanyaan tentang radikalisasi demokrasi harus diajukan terlebih dahulu. Pada level nasional ini, kehendak kolektif untuk melawan pelbagai dampak pascademokrasi globalisasi neoliberal harus dibentuk. Hanya ketika kehendak kolektif berhasil terkonsolidasikan, kolaborasi dengan gerakan-gerakan yang sama di negara lain dapat menjadi produktif. Jelas bahwa perjuangan melawan neoliberalisme tidak dapat dimenangkan sendirian pada level nasional dan untuk itu perlu membangun suatu aliansi pada level Uni Eropa. Tetapi strategi populis kiri tidak dapat mengabaikan investasi libidinal kuat yang bekerja dalam pelbagai bentuk identifikasi nasional—atau regional—dan akan sangat berisiko untuk meninggalkan wilayah ini ke populisme sayap-kanan. Hal ini tidak berarti mengikuti langkah populisme sayap-kanan yang mempromosikan bentuk-bentuk nasionalisme yang tertutup dan defensif, tetapi menawarkan jalan keluar lain bagi pelbagai afeksi tersebut dengan memobilisasi afeksi tersebut di sekitar identifikasi patriotik dengan aspek-aspek terbaik dan lebih egaliter dari tradisi nasional.

Saat ini kita perlu mempertimbangkan suatu perso-

alan yang saya anggap krusial untuk mengonsepsikan pembentukan koalisi 'rakyat': peranan penting yang dimainkan oleh afeksi dalam pembentukan identitas politik. Dalam pandangan saya, kurangnya pemahaman tentang dimensi afektif dalam proses identifikasi merupakan salah satu alasan utama yang membuat kubu kiri, yang terkungkung dalam kerangka rasionalis, tidak mampu merengkuh dinamika politik. Tidak diragukan lagi, rasionalisme ini menjadi penyebab penolakan keras dari begitu banyak teoretikus kiri untuk menerima ajaran psikoanalisis.

Hal tersebut merupakan persoalan serius karena kritik Freud terhadap idea tentang karakter terpadu dari subjek dan klaim Freud bahwa pikiran manusia harus tunduk pada pembagian antara dua sistem, yang salah satunya tidak dapat disadari, sangat penting untuk politik. Freud menunjukkan bahwa, jauh dari keteraturan transparansi ego, kepribadian tersusun atas beberapa level yang berada di luar kesadaran dan rasionalitas agen. Untuk itu, Freud mengharuskan kita untuk meninggalkan salah satu ajaran utama filsafat rasionalis—kategori subjek sebagai entitas rasional dan transparan yang mampu memberikan makna homogen pada totalitas tindakannya—dan menerima bahwa 'individu' hanyalah identitas referensial yang dihasilkan dari artikulasi di antara posisi lokal subjek. Klaim psikoanalisis bahwa tidak ada identitas esensial tetapi hanya bentuk-bentuk identifikasi merupakan gagasan pokok pendekatan anti-esensialis

yang menekankan bahwa sejarah subjek merupakan sejarah pelbagai identifikasinya dan tidak ada identitas yang tersembunyi yang bisa diselamatkan selain identifikasi subjek.

Dengan mengadopsi pemikiran dari Freud, pendekatan anti-esensialis ini mengakui bahwa dimensi penting dari politik adalah pembentukan identitas politik dan hal ini selalu meniscayakan adanya dimensi afektif. Dalam *Group Psychology and the Analysis of the Ego*, Freud menyoroti peranan penting yang dimainkan oleh ikatan libidinal afektif dalam proses identifikasi kolektif: 'Suatu kelompok secara jelas disatukan oleh kekuatan dari beberapa jenis: dan kekuatan tindakan ini bisa dianggap lebih baik daripada Eros, yang menyatukan segala sesuatu di dunia.'[4]

Mengetahui peranan energi libidinal dan fakta bahwa hal ini dapat ditundukkan dan dapat diorientasikan ke dalam banyak arah yang menghasilkan berbagai afeksi berbeda-beda, merupakan hal penting untuk memahami cara kerja operasi hegemonik. Mengembangkan kehendak kolektif yang bertujuan untuk radikalisasi demokrasi membutuhkan mobilisasi energi afeksi melalui pemosisian dalam praktik-praktik diskursif yang menghasilkan identifikasi dengan visi egaliter demokratis. Dengan 'praktik diskursif', saya tidak merujuk pada praktik yang secara eksklusif berkaitan dengan ucapan atau tulisan, mela-

4 Sigmund Freud, 'Group Psychology and the Analysis of the Ego', dalam *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, vol. XVIII (London: Vintage, 2001), hal. 92.

inkan praktik penandaan di mana makna dan tindakan, komponen linguistik dan afektif tidak dapat dipisahkan. Melalui penempatan agen sosial dalam praktik-praktik penandaan diskursif/afektif, yang meliputi kata-kata, afeksi dan tindakan inilah, agen sosial mendapatkan bentuk subjektivitasnya.

Untuk menggambarkan penandaan diskursif/afektif tersebut, kita dapat menemukan gagasan penting dari Spinoza tentang *'conatus'* yang memiliki kesamaan dengan gagasan Freud tentang 'libido'. Seperti Freud, Spinoza percaya bahwa hasratlah yang menggerakkan manusia untuk bertindak dan dia melihat bahwa apa yang membuat manusia bertindak dalam suatu arah ketimbang dalam arah yang lain adalah afeksi. Dalam refleksi tentang afeksi di bukunya berjudul *Ethics*, Spinoza membuat pembedaan antara afeksi *(affection)* dan afek *(affectus)*.[5] 'Afeksi' adalah keadaan tubuh sejauh ia tunduk pada tubuh yang lain. Ketika dipengaruhi oleh aspek eksterior, *conatus* (usaha umum untuk bertahan dalam keberadaan kita) akan mengalami afek yang akan mendorongnya untuk menghasrati sesuatu atau bertindak karenanya.

Saya menyarankan untuk menerapkan dinamika *affectio/affectus* ini untuk memeriksa proses pembentukan identitas politik, dengan melihat 'afeksi' sebagai praktik di mana diskursif dan afektif diartikulasikan, akan menghasilkan bentuk-bentuk identifikasi tertentu. De-

[5] Benedictus de Spinoza, *Ethics*, terj. Edwin Curley (New York: Penguin, 1994), bagian 3.

ngan dipandang sebagai kristalisasi dari afek, identifikasi tersebut penting bagi politik karena menjadi motor penggerak aksi politik.

Pendekatan hegemonik telah dikritik oleh beberapa teoretikus *'affective turn'*, yang mengklaim bahwa pendekatan ini hanya mempertimbangkan dimensi diskursif. Menyanggah kritisisme ini, Yannis Stavrakakis telah menunjukkan bagaimana orang-orang yang mendukung pendekatan 'pascahegemonik' keliru, karena dengan memisahkan diskursif dari afektif, mereka melewatkan inter-implikasi diskursif mereka.[6] Sebaliknya, teori hegemoni diskursif mengakui inter-implikasi tersebut ketika menegaskan bahwa 'sesuatu yang termasuk ke dalam tatanan afek memiliki peranan penting dalam membentuk yang-sosial secara diskursif.'[7]

Beberapa pendukung *'affective turn'* mengajukan pandangan mereka tentang afek berdasarkan pada pemikiran Spinoza, tetapi terdapat alasan yang bagus untuk mempertanyakan genealoginya. Saya menemukan interpretasi yang jauh lebih meyakinkan dari Frédéric Lordon, dalam pembacaannya atas peranan afek dalam pemikiran Spinoza, menegaskan bagaimana baginya politik adalah *ars effectandi* (seni mempengaruhi—penerj.), yang berhubungan dengan produksi gagasan dengan ke-

6 Yannis Stavrakakis, 'Hegemony or Posthegemony? Discourse, Representation and the Revenge(s) of the Real' dalam *Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude Versus the Hegemony of the People*, ed. Alexandros Kioupkiolis dan Giorgos Katsambekis (New York: Ashgate, 2014).

7 Ernesto Laclau, 'Glimpsing the Future: A Reply', dalam *Laclau: A Critical Reader*, ed. Simon Critchley dan Oliver Marchart (New York: Routledge, 2004), hal. 326.

kuatan untuk mempengaruhi *(idées affectantes)*.[8] Dengan mempertanyakan keistimewaan yang diberikan oleh Marxisme kepada determinasi material dan persoalan antinomi yang dibangun di antara materi dan ide, Lordon menunjukkan bagaimana Spinoza memungkinkan kita untuk melampaui keistimewaan Marxisme tersebut melalui gagasan 'afeksi' yang dihasilkan dari ide maupun determinasi material. Ketika pertemuan antara ide dan afek terjadi, ide mendapatkan kekuatan.

Ketika membayangkan praktik-praktik diskursif/afektif, kita juga dapat mengambil inspirasi dari Wittgenstein, yang mengajari kita bahwa melalui penempatan praktik-praktik tersebut dalam 'permainan bahasa' *(language games)* (yang kita sebut praktik diskursif), agen-agen sosial membentuk keyakinan dan hasrat tertentu dan memperoleh subjektivitas mereka. Dengan mengikuti pendekatan Wittgenstein, kita dapat menggambarkan kesetiaan pada demokrasi, tidak berdasarkan pada rasionalitas tetapi berdasarkan pada partisipasi dalam pelbagai bentuk kehidupan tertentu. Seperti yang telah kerap kali ditunjukkan oleh Richard Rorty, perspektif Wittgensteinian membuat kita menyadari bahwa kesetiaan pada demokrasi dan kepercayaan pada nilai institusi demokrasi tidak bergantung pada memberi demokrasi suatu landasan intelektual.

Kesetiaan pada nilai-nilai demokrasi merupakan per-

[8] Frédéric Lordon, *Les Affects de la politique* (Paris: Seuil, 2016), hal. 57.

soalan identifikasi. Hal ini tidak terbentuk melalui argumentasi rasional tetapi melalui serangkaian permainan bahasa yang membangun pelbagai bentuk individualitas yang demokratis. Wittgenstein secara jelas mengakui dimensi afektif dari pelbagai bentuk kesetiaan yang berbeda-beda ketika dia menyamakan keyakinan religius dengan 'komitmen yang penuh gairah terhadap sistem referensi.'[9] Dengan mempertemukan Spinoza, Freud dan Wittgenstein, kita dapat melihat pemosisian dalam praktik diskursif memberikan afeksi yang bagi Spinoza menghasilkan afek yang memacu hasrat dan mengarah pada tindakan tertentu. Dengan cara seperti inilah, afek dan hasrat memainkan peranan krusial dalam pembentukan pelbagai bentuk identifikasi kolektif.

Melalui cara mengenali peran krusial yang dimainkan oleh afek dalam politik dan bagaimana afek tersebut dapat dimobolisir merupakan hal yang menentukan untuk merancang keberhasilan strategi populis kiri. Strategi seperti ini harus mengikuti arahan Gramsci ketika dia menyerukan 'suatu kohesi organik di mana perasaan-renjana *(feeling-passion)* menjadi pemahaman.' Beroperasi dengan gagasan dari 'pandangan umum', berarti harus merangkul orang dengan cara menyentuh aspek afeknya. Sesuai dengan nilai dan identitas orang-orang yang hendak diinterpelasi dan harus terhubung dengan aspek pengalaman rakyat. Untuk beresonansi dengan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dalam kehidu-

9 Ludwig Wittgenstein, *Culture and Value*, terj. Peter Winch (Chicago: University of Chicago Press, 1984), hal. 64.

pan kesehariannya, strategi populis kiri harus memulai dari di mana mereka hidup dan bagaimana perasaan mereka, dengan menawarkan mereka suatu visi masa depan yang memberikan mereka harapan, alih-alih menyisakan daftar pengaduan.

Strategi populis kiri bertujuan melakukan kristalisasi atas kehendak kolektif yang disokong oleh afek bersama demi menggapai cita-cita berupa suatu tatanan yang lebih demokratis. Tujuan ini memerlukan pembentukan rezim hasrat dan afek yang berbeda-beda melalui keterlibatan dalam praktik-praktik diskursif/afektif yang akan melahirkan bentuk-bentuk identifikasi yang baru. Praktik-praktik diskursif/afektif tersebut memiliki watak yang bermacam-macam, tetapi bidang kultural dan artistik merupakan medan yang sangat penting bagi pembentukan berbagai bentuk subjektivitas.

Sekali lagi, Gramsci menjadi penunjuk yang sangat diperlukan karena dia telah menunjukkan sentralitas domain kultural dalam pembentukan dan penyebaran 'pandangan umum' *(common sense)* yang dapat menentukan definisi tertentu tentang realitas. Dengan melihat 'pandangan umum' sebagai hasil dari artikulasi diskursif memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana pandangan umum tersebut dapat diubah berkat intervensi kontra-hegemoni. Lewat penekanan pada peranan penting dari praktik-praktik artistik dan kultural dalam perjuangan hegemonik, saya berpendapat dalam buku *Agonistics* bahwa jika praktik artistik dapat memainkan

peranan penting dalam pembentukan bentuk-bentuk subjektivitas baru, hal ini karena, dalam menggunakan berbagai cara yang menimbulkan respons emosional, praktik artistik tersebut mampu menyentuh manusia pada tingkatan afektifnya. Di sinilah letak kekuatan besar artistik, dalam kapasitasnya untuk membuat kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, untuk membuat kita melihat kemungkinan-kemungkinan baru.

Atas alasan tersebut, praktik artistik dan kultural memiliki peranan penting untuk diimplementasikan dalam strategi populis kiri. Untuk mempertahankan hegemoninya, sistem neoliberal perlu terus memobilisasi hasrat rakyat dan membentuk identitas mereka. Pembentukan koalisi 'rakyat' yang tepat untuk membangun suatu hegemoni berbeda memerlukan pengelolaan keragaman praktik-praktik diskursif/afektif yang akan mengikis afek bersama yang menyokong hegemoni neoliberal dan menciptakan kondisi bagi radikalisasi demokrasi. Hal ini esensial bagi strategi populis kiri untuk mengakui pentingnya menumbuhkan afek bersama, karena seperti yang ditekankan oleh Spinoza, afek hanya dapat digantikan oleh afek yang berlawanan, afek yang lebih kuat daripada afek yang hendak direpresi.

KESIMPULAN

DENGAN meneliti krisis yang terjadi belakangan ini di Eropa Barat, saya telah berpendapat bahwa kita sedang hidup dalam 'momen populis'. Momen ini merupakan ekspresi perlawanan terhadap kondisi pascademokrasi yang disebabkan oleh hegemoni neoliberal selama tiga puluh tahun. Hegemoni tersebut sekarang sedang memasuki krisis dan krisis ini menjadi kesempatan untuk membangun formasi hegemonik baru. Formasi hegemoni baru bisa jadi lebih otoriter atau lebih demokratis, tergantung pada bagaimana perlawanan tersebut akan diartikulasikan dan jenis politik apa yang akan digunakan untuk menantang neoliberalisme.

Semuanya bergantung pada perangkat diskursif dan afektif yang melaluinya makna akan dilekatkan pada pelbagai macam tuntutan demokratik yang menjadi ciri dari 'momen populis' ini. Kemungkinan mengimplementasikan praktik kontra-hegemoni untuk mengakhiri konsensus pascapolitik memerlukan pembentukan batas

politik. Berdasarkan strategi populis kiri, batas ini harus dibangun dengan cara 'populis', dengan menghadapkan 'rakyat' melawan 'oligarki', suatu konfrontasi di mana 'rakyat' dibentuk oleh artikulasi dari berbagai macam tuntutan demokratik. 'Rakyat' tidak dipahami sebagai referensi empiris atau kategori sosiologis. 'Rakyat' merupakan konstruksi diskursif yang dihasilkan dari 'rantai ekuivalensi' antara berbagai tuntutan heterogen yang penyatuannya dijamin oleh identifikasi dengan konsepsi kewargaan demokrasi radikal dan oposisi bersama terhadap oligarki, kekuatan-kekuatan yang secara struktural menghalangi realisasi proyek demokratik.

Saya telah menekankan perihal fakta bahwa tujuan strategi populis kiri bukanlah untuk membangun 'rezim populis', melainkan membentuk subjek kolektif yang tepat untuk melancarkan serangan politik supaya dapat membangun formasi hegemonik baru dalam kerangka demokrasi liberal. Formasi hegemoni baru harus menciptakan kondisi bagi pemulihan dan pendalaman demokrasi, tetapi proses ini mengikuti pola yang berbeda-beda tergantung dengan konteks nasional.

Apa yang saya usulkan adalah strategi khusus pembentukan batas politik dan bukan program politik yang sepenuhnya matang. Partai atau gerakan yang mengadopsi strategi populis kiri dapat mengikuti keragaman konteks; perbedaan-perbedaan akan ada di antara partai atau gerakan dan tidak harus diidentifikasi dengan nama tersebut. Pada tingkat analitis, partai atau gerakan

tersebut dapat disebut sebagai 'populis kiri'.

Sudah diperkirakan bahwa strategi populis kiri ini akan dicela oleh berbagai sektor kiri yang terus mereduksi politik menjadi kontradiksi kapital/buruh dan memberikan keistimewaan ontologis pada kelas pekerja, yang dijadikan sebagai kendaraan bagi revolusi sosialis. Para sektor kiri tersebut tentu saja akan melihatnya sebagai ketundukan kepada 'ideologi borjuis'. Tidak ada gunanya menjawab kritik-kritik yang berasal dari konsepsi politik yang telah saya bantah.

Akan tetapi, terdapat jenis keberatan lain yang perlu dipertimbangkan. Mengingat konotasi sangat negatif yang dibawa oleh istilah 'populisme' di Eropa Barat, keraguan muncul dari beberapa pihak tentang kelayakan penggunaan populisme untuk memenuhi syarat suatu jenis politik yang mungkin lebih mudah diterima dengan nama berbeda. Mengapa disebut populis? Apa yang hendak dicapai dengan istilah itu? Saya ingin menunjukkan bahwa konotasi negatif hanya terjadi dalam konteks Eropa dan, seperti yang saya tunjukkan di awal, konotasi tersebut berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh para pembela *status quo* pascapolitik untuk mendiskualifikasi segala kekuatan yang menantang klaim mereka bahwa tidak ada alternatif atas globalisasi neoliberal. Label yang peyoratif tersebut menunjukkan semua gerakan tersebut sebagai bahaya bagi demokrasi. Namun, dalam konteks yang lain, 'gerakan populis' dipandang secara positif, seperti misalnya yang terjadi

dengan kasus *American People's Party* yang lahir pada 1891, sebagaimana dijelaskan oleh Michael Kazin dalam bukunya *The Populist Persuasion*,[10] mereka memperjuangkan kebijakan-kebijakan progresif untuk memperkuat demokrasi. *American People's Party* tidak bertahan lama, tetapi kebijakan-kebijakan yang diperjuangkannya diadopsi oleh para liberal dan berpengaruh dalam *New Deal*.

Meskipun kemudian di Amerika Serikat muncul arus penting populisme sayap kanan, istilah populisme ini tetap terbuka untuk penggunaan positif, seperti bisa kita lihat hari ini dengan apresiasi luas terhadap politik Bernie Sanders, yang strateginya jelas merupakan strategi populis kiri.

Ketika diakui bahwa populisme dapat memberikan strategi politik untuk memperkuat demokrasi, kita bisa mulai membayangkan pentingnya, dalam krisis Eropa Barat akhir-akhir ini, untuk memaknai kembali istilah ini dengan cara yang positif, sehingga membuatnya tersedia untuk menamai bentuk politik kontra-hegemoni melawan tatanan neoliberal. Dalam momen pascademokrasi, ketika pemulihan dan radikalisasi demokrasi menjadi suatu agenda, populisme, dengan menekankan *demos* sebagai dimensi esensial dari demokrasi, sangat cocok untuk memenuhi syarat logika politik yang sesuai dengan keadaan krisis. Dengan dipahami sebagai strategi politik yang menekankan perlunya menarik batas politik

[10] Michael Kazin, *The Populist Persuasion: An American History* (New York: Basic Books, 1995).

antara rakyat dan oligarki, populisme menantang pandangan pascapolitik yang mempersamakan demokrasi dengan konsensus. Lebih lanjut, dengan mengacu pada pembentukan kehendak kolektif yang ditafsirkan sebagai artikulasi dari berbagai tuntutan demokratik, populisme mengakui perlunya untuk mempertimbangkan berbagai perjuangan heterogen, alih-alih membayangkan subjek politik kolektif yang eksklusif dalam istilah 'kelas'.

Aspek penting lain dari strategi populis adalah pengakuannya terhadap dimensi afektif dalam berbagai bentuk identifikasi politik dan pentingnya memobilisasi afeksi bersama, suatu aspek yang biasanya absen dari bentuk politik kiri tradisional. Atas dasar alasan tersebutlah, dalam perjuangan membangun formasi hegemoni baru, sangat penting untuk mengadopsi strategi 'populis'.

Tetapi kenapa disebut populisme 'kiri'? Pertanyaan semacam itu memang diajukan oleh beberapa orang yang setuju pada perlunya mengembangkan strategi populis yang ditujukan untuk radikalisasi demokrasi, tetapi mempertanyakan manfaat dari menyebutnya sebagai 'kiri'. Beberapa dari mereka mengusulkan untuk lebih baik menyebutnya populisme 'demokratik', dan yang lain dengan populisme 'progresif' atau populisme 'humanis'. Terdapat dua alasan yang biasanya dimajukan untuk menolak penyebutan populisme 'kiri'. Alasan yang pertama adalah bahwa, dengan konversi ke neoliberalisme dari partai-partai sosial-demokratik—yang sering diidentifikasi sebagai 'kubu kiri'—penanda kiri telah sepenuhnya

diragukan dan kehilangan semua konotasi progresifnya. Karena mereka tidak ingin diidentifikasi dengan jenis kiri yang lain, yang mengklaim mewakili kiri 'sejati', para pendukung strategi populis lebih memilih untuk menghilangkan label 'kiri'. Saya berbagi keprihatinan mereka yang ingin menekankan kekhasan strategi populis berkaitan dengan dua makna 'kiri' saat ini, tetapi saya percaya bahwa berbicara tentang *populisme* kiri sudah cukup untuk membedakannya dari pemahaman biasa tentang istilah kiri.

Terdapat alasan lain yang dikemukakan untuk membuang istilah kiri ini: fakta bahwa istilah kiri tidak cocok dengan karakter transversal dari strategi populis. Dinyatakan bahwa secara umum kubu 'kiri' mengemukakan berbagai kepentingan dari sektor sosial-ekonomi tertentu dan mengabaikan berbagai tuntutan, menurut strategi populis, yang seharusnya dimasukkan ke dalam pembentukan kehendak kolektif. Saya menganggap alasan ini merupakan keberatan yang lebih substansial. Sebenarnya, apabila dilihat dari perspektif sosiologis sebagai yang mewakili berbagai kepentingan kelompok sosial yang tetap, gagasan kubu kiri tidak memenuhi syarat sebagai 'kita', 'rakyat' yang dihasilkan dari artikulasi berbagai tuntutan demokratik heterogen. Pembentukan koalisi 'rakyat' lewat cara transversal, dengan tujuan membentuk mayoritas rakyat yang independen dari afiliasi politik lama, merupakan hal yang membedakan batas politik populis dari kubu tradisional kiri dan kanan.

Dalam pengertian itulah, klaim oleh berbagai gerakan seperti Podemos bahwa mereka 'bukan kiri atau kanan' harus dipahami. Tidak dalam pengertian bahwa mereka mengejar politik tanpa batas politik, dalam model 'jalan ketiga', tetapi dalam pengertian bahwa mereka membentuk batas politik dengan cara berbeda. Persoalannya adalah posisi seperti itu, dengan tidak mengeksplisitkan cara partisan di mana 'rakyat' dikonstruksi, menyisakan ketidakjelasan orientasi politiknya.

Untuk menghindari ketidakpastian politik inilah, saya percaya bahwa penting untuk menyebut populisme 'kiri' dengan mengacu pada makna lain dari 'kiri', yang menyangkut dimensi aksiologisnya dan menandakan nilai-nilai yang dibelanya: kesetaraan dan keadilan sosial. Dimensi ini saya anggap krusial untuk ditegakkan dalam formulasi strategi populis yang bertujuan meradikalisasi demokrasi. Ketika diketahui bahwa 'rakyat' dapat dikonstruksi dengan cara yang berbeda, dan bahwa partai populis sayap-kanan juga mengonstruksi 'rakyat', maka penting, terutama demi alasan *politik*, untuk menunjukkan rakyat seperti apa yang hendak dikonstruksi. Terlepas dari semua klaim tentang keusangan distingsi kiri dan kanan, metafora 'kiri' dan 'kanan' masih menjadi penanda simbolik utama masyarakat Eropa Barat dalam diskursus politik dan saya tidak berpikir bahwa adalah hal yang bijaksana untuk mengabaikannya. Apa yang dibutuhkan adalah memulihkan watak konfrontasi dari politik dan memaknai ulang arti kiri.

Distingsi kiri/kanan dapat digambarkan baik sebagai pembelahan politik maupun batas politik. Dalam masa pascapolitik, perbedaan antara kiri dan kanan biasa digambarkan dalam istilah 'pembelahan'—yakni, jenis pembagian (divisi) yang tidak disusun oleh suatu antagonisme tetapi sekadar menandakan perbedaan posisi. Apabila dipahami dengan cara seperti itu, maka distingsi kiri/kanan tidak sesuai dengan proyek radikalisasi demokrasi. Hanya ketika perbedaan digambarkan dalam istilah batas politik, yang menunjukkan adanya antagonisme antara posisi masing-masing dan ketidakmungkinan 'posisi moderat', maka perbedaan diformulasikan dengan cara politik secara tepat. Saya percaya bahwa 'efek batas' ini lebih sulit untuk dikemukakan dengan gagasan seperti populisme 'progresif' atau 'demokratis', dan bahwa populisme 'kiri' mengemukakan secara lebih jelas keberadaan antagonisme antara rakyat dan oligarki yang tanpanya strategi hegemoni tidak dapat diformulasikan.

Daripada melihat momen populis hanya sebagai ancaman bagi demokrasi, penting untuk disadari bahwa momen populis tersebut juga menawarkan kesempatan untuk meradikalisasi demokrasi. Untuk merebut kesempatan tersebut, sangat penting mengakui bahwa politik pada dasarnya adalah partisan dan membutuhkan pembentukan batas antara 'kita' dan 'mereka'. Hanya dengan memulihkan karakter agonistik dari demokrasi, maka akan ada kemungkinan untuk memobilisasi afeksi dan menciptakan kehendak kolektif menuju pendalaman

cita-cita demokrasi. Akankah proyek ini berhasil? Tentu tidak ada jaminan, tetapi akan menjadi kesalahan fatal apabila menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh kondisi krisis saat ini.

LAMPIRAN TEORETIS

Pendekatan Anti-Esensialis

Terdapat dua cara untuk menggambarkan domain yang-politis. Pandangan asosiatif melihat yang-politis sebagai medan kebebasan dan untuk mencapai persetujuan. Sebagai alternatif, pandangan disasosiatif melihat yang-politis sebagai medan konflik dan antagonisme.[1] Refleksi saya tergolong sebagai padangan disasositif dan dipengaruhi oleh pendekatan teoretis yang dikembangkan dalam HSS, di mana terdapat dua konsep utama yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang-politis: 'antagonisme' dan 'hegemoni'.[2] Kedua konsep tersebut mengacu pada keberadaan dimensi negativitas radikal yang memanifestasikan dirinya sendiri dalam kemungkinan antagonisme yang selalu hadir. Pandangan ini menghalangi totalisasi

---

1 Distingsi antara pandangan asosiatif dan disasosiatif ini dimajukan oleh Oliver Marchart dalam *Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), hal. 38–44.

2 Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, paperback edition (New York and London: Verso, 2014).

masyarakat secara penuh dan menutup kemungkinan adanya suatu masyarakat di luar pembelahan dan kekuasaan.

Masyarakat dipandang sebagai produk dari rangkaian praktik hegemonik yang tujuannya adalah untuk membangun tatanan dalam konteks kontingensi. Masyarakat merupakan ranah dari berbagai praktik yang 'mengendap'—yakni, praktik menyembunyikan tindakan asli institusi politik masyarakat yang kontingen dan diterima begitu saja seolah-olah masyarakat ada begitu saja. Setiap tatanan sosial merupakan artikulasi praktik hegemonik temporer dan rentan yang tujuannya adalah untuk membangun tatanan dalam konteks kontingensi. Praktik hegemonik adalah praktik artikulasi yang melaluinya tatanan tertentu diciptakan dan makna institusi sosial ditetapkan.

Segala sesuatu selalu bisa menjadi sebaliknya dan setiap tatanan didasarkan pada pengecualian terhadap kemungkinan lain. Setiap tatanan selalu merupakan ekspresi dari konfigurasi relasi kuasa tertentu dan tidak cukup memiliki landasan rasional. Apa yang tampak sebagai tatanan alami tidak pernah merupakan manifestasi dari objektivitas yang lebih dalam berada di luar praktik yang membuatnya ada. Oleh karena itu, setiap tatanan yang ada rentan untuk ditantang oleh praktik-praktik kontra-hegemonik, praktik mendisartikulasikan tatanan yang ada guna mengimplementasikan bentuk hegemoni lain.

Ajaran penting kedua dari pendekatan anti-esensialis adalah bahwa agen sosial dibentuk oleh serangkaian 'posisi diskursif' yang tidak pernah sepenuhnya bisa difiksasi dalam sistem perbedaan yang tertutup. Agen sosial dibentuk oleh keragaman diskursus, yang di antara keragaman tersebut tidak ada relasi yang mutlak melainkan gerakan konstan dari overdeterminasi dan pergantian posisi. Oleh karena itu, 'identitas' dari subjek yang beragam dan kontradiktif selalu kontingen, rentan, temporer di persimpangan diskursus tersebut dan bergantung pada bentuk identifikasi tertentu.

Dengan demikian, tidak mungkin membicarakan agen sosial seolah-olah kita berhadapan dengan entitas yang satu dan homogen. Kami lebih suka mendekati agen sosial sebagai pluralitas, bergantung pada berbagai posisi subjek yang melaluinya agen sosial dibentuk dalam berbagai formasi diskursif, suatu relasi mutlak di antara berbagai diskursus membentuk posisi subjek yang berbeda-beda, dan mengakui bahwa tidak ada yang *a priori*. Namun, pluralitas ini tidak mencakup koeksistensi pluralitas posisi subjek, tetapi mencakup subversi dan overdeterminasi konstan terhadap satu pihak oleh pihak lain, yang memungkinkan lahirnya efek totalisasi dalam suatu medan yang dicirikan oleh batas-batas terbuka dan pasti.

Oleh karena itu, terdapat gerakan ganda: pada satu sisi, gerakan penyingkiran *(decentering)* yang mencegah fiksasi terhadap serangkaian posisi di sekitar posisi yang

telah dibentuk sebelumnya; pada sisi lain, dan sebagai hasil dari non-fiksitas esensial, suatu gerakan yang berlawanan: pelembagaan atas berbagai titik sentral *(nodal point)*, fiksasi parsial yang membatasi perubahan di bawah penanda. Tetapi dialektika non-fiksitas/fiksasi ini dimungkinkan hanya karena fiksasi tidak ada begitu saja sebelumnya, karena tidak ada pusat subjektivitas yang mendahului identifikasi subjek. Atas alasan tersebut, kita harus melihat sejarah subjek sebagai sejarah identifikasinya dan tidak ada identitas tersembunyi yang bisa disingkap selain identifikasi subjek.

Untuk menyangkal keberadaan yang *a priori*, hubungan mutlak antara berbagai posisi subjek tidak berarti bahwa tidak ada upaya tetap untuk membangun hubungan historis, kontingen, dan variabel di antara posisi subjek. Jenis hubungan tersebut membentuk kontingensi di antara berbagai posisi subjek, relasi tidak ditentukan sebelumnya yang disebut sebagai 'artikulasi'. Walaupun tidak ada hubungan mutlak di antara berbagai posisi subjek yang berbeda-beda, dalam medan politik, selalu ada diskursus yang mencoba memberikan artikulasi dari sudut pandang berbeda.

Atas alasan tersebut, setiap posisi subjek selalu dibentuk dalam struktur diskursif yang pada dasarnya tidak stabil, karena setiap posisi subjek tunduk pada berbagai praktik artikulatoris yang terus-menerus membongkar dan mengubah posisi subjek. Inilah mengapa tidak ada posisi subjek yang berhubungan dengan selain dirinya

bersifat mutlak, dengan demikian, tidak ada identitas sosial yang diperoleh secara penuh dan permanen.

Konsepsi Demokrasi Agonistik

Setelah HSS, bagian penting dari karya saya didedikasikan untuk mengelaborasi model alternatif dari politik demokrasi yang dapat menjelaskan keniscayaan antagonisme dan watak hegemonik dari politik.[3] Pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab adalah sebagai berikut: Bagaimana menggambarkan demokrasi dalam kerangka pendekatan hegemonik? Bagaimana bisa tatanan demokrasi mengakui dan mengelola keberadaan konflik yang tidak berujung pada solusi rasional? Bagaimana mengonsepsikan demokrasi dengan cara yang memungkinkan di tengah-tengahnya terjadi konfrontasi antara berbagai proyek hegemonik yang saling bertentangan?

Jawaban saya atas pertanyaan tersebut adalah model demokrasi agonistik yang saya lihat memberikan kerangka analitik yang dibutuhkan untuk menggambarkan kemungkinan konfrontasi demokratik di antara berbagai proyek hegemonik. Secara singkat, argumen saya perihal model demokrasi agonistik adalah sebagai berikut.

Ketika kita menerima dimensi 'yang-politis', kita mulai menyadari bahwa salah satu tantangan utama bagi

[3] Saya telah mengembangan konsepsi agonistik ini dalam beberapa buku sebagai berikut: *The Return of the Political* (New York and London: Verso, 1993, rev. ed. 2005); *The Democratic Paradox* (New York and London: Verso, 2000, rev. ed. 2009); *On the Political* (Abingdon, UK: Routledge, 2005); dan *Agonistics: Thinking the World Politically* (New York and London: Verso, 2013).

politik demokrasi-liberal pluralis adalah berupa usaha untuk menolak potensi antagonisme yang ada dalam berbagai relasi manusia sehingga memungkinkan ada koeksistensi manusia. Persoalan fundamentalnya bukanlah bagaimana menggapai konsensus yang diraih tanpa eksklusi, karena hal ini akan memerlukan pembentukan 'kita' yang tidak ada hubungannya dengan 'mereka'. Kondisi ini tidak mungkin karena syarat utama bagi pembentukan 'kita' adalah demarkasi dengan 'mereka'.

Dengan demikian, persoalan krusial dalam rezim demokrasi liberal adalah bagaimana membangun distingsi kita/mereka ini, yang memang bersifat konstitutif terhadap politik, dengan cara yang kompatibel dengan pluralisme. Poinnya adalah bahwa ketika konflik terjadi tidak mewujud dalam suatu 'antagonisme' (perselisihan di antara musuh, *enemy*) tetapi suatu 'agonisme' (perselisihan di antara lawan, *adversary*). Konfrontasi agonistik berbeda dari konfrontasi antagonistik, bukan karena konfrontasi agonistik memungkinkan terjadinya konsensus, tetapi karena oposisi tidak dianggap sebagai musuh yang harus dilenyapkan, melainkan sebagai lawan yang eksistensinya dianggap sebagai hal yang absah. Ide-ide lawan akan ditentang habis-habisan tetapi hak lawan untuk mempertahankan idenya tidak akan pernah dipersoalkan. Namun, kategori *musuh* tidak hilang karena tetap relevan dengan mereka yang, karena menolak konsensus konfliktual merupakan dasar bagi demokrasi pluralis, tidak dapat menjadi bagian dari perjuangan

agonistik.

Oleh karena itu, persoalan keterbatasan pluralisme merupakan hal krusial bagi demokrasi yang perlu diatasi dan tidak ada jalan untuk kabur dari persoalan tersebut. Dengan menegaskan karakter konstitutif dari pembelahan sosial dan ketidakmungkinan adanya rekonsiliasi final, perspektif agonistik mengakui perlunya karakter partisan dari politik demokratik. Dengan menggambarkan konfrontasi ini dengan istilah lawan dan bukan dengan mode teman/musuh karena mungkin akan mengarah ke perang sipil, hal ini memungkinkan konfrontasi semacam ini terjadi dalam institusi-institusi demokratik.

Konfrontasi yang penting tersebut merupakan hal yang dihindari oleh sebagian besar para teoretikus demokrasi-liberal, karena cara mereka dalam memandang pluralisme tidak memadai. Sementara kita menyadari bahwa kita hidup di dunia di mana berbagai perspektif dan nilai hidup berdampingan *(coexist)* dan bahwa tidak mungkin, karena alasan empiris, kita masing-masing akan mengadopsi semua perspektif dan nilai tersebut, para teoretikus demokrasi-liberal tersebut membayangkan bahwa, jika disatukan, perspektif dan nilai-nilai tersebut membentuk suatu harmoni dan rangkaian non-konfliktual. Oleh sebab itu, jenis pemikiran tersebut tidak mampu menjelaskan watak konfliktual yang semestinya dari pluralisme, yang berasal dari ketidakmungkinan untuk merekonsiliasikan semua sudut pandang, dan inilah kenapa pemikiran tersebut pasti menegasikan yang-politis dalam dimensi

antagonistiknya.

Yang dipertaruhkan dalam perjuangan agonistik adalah konfigurasi relasi kuasa yang membentuk tatanan sosial dan jenis hegemoni yang dikonstruksi oleh relasi kuasa tersebut. Konfrontasi antara berbagai proyek hegemonik yang saling berkonflik inilah yang tidak pernah bisa direkonsialisasikan secara rasional. Oleh karena itu, dimensi antagonistik selalu ada tetapi diberlakukan melalui sarana konfrontasi, yang prosedurnya diterima oleh para lawan *(adversary)*. Tidak seperti model liberal, perspektif agonistik tersebut meyakini fakta bahwa setiap tatanan sosial terbentuk secara politis dan dasar di mana intervensi hegemonik terjadi tidak pernah netral, karena tatanan sosial selalu merupakan produk dari praktik-praktik hegemoni sebelumnya. Tampak bahwa ruang publik merupakan medan pertarungan di mana berbagai proyek hegemonik saling berkonfrontasi satu sama lain, dengan tanpa kemungkinan adanya rekonsiliasi final.

Distingsi antara *antagonisme* (relasi teman/musuh) dan *agonisme* (relasi di antara lawan) memungkinkan pemahaman tentang mengapa, bertentangan dengan apa yang diyakini oleh banyak teoretikus demokrasi, tidak perlu meniadakan antagonisme yang memang tidak dapat dihilangkan untuk memvisualisasikan pembentukan tatanan demokratis.

Saya berpendapat bahwa konfrontasi agonistik, jauh dari merepresentasikan bahaya bagi demokrasi, dalam

realitasnya merupakan syarat utama bagi eksistensi demokrasi. Tentu saja, demokrasi tidak dapat bertahan tanpa bentuk-bentuk konsensus tertentu mengenai kesetiaan pada nilai-nilai etika-politik yang membentuk prinsip-prinsip legitimasinya, dan pada institusi-institusi di mana nilai-nilai tersebut bersemayam. Tapi bentuk konsensus tertentu ini juga harus memungkinkan ekspresi agonistik dari konflik, yang mensyaratkan bahwa warga negara benar-benar memiliki kemungkinan untuk memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Demokrasi yang berfungsi dengan baik membutuhkan konfrontasi demokratik di antara berbagai posisi politik. Jika hal ini luput, makan selalu ada bahaya: konfrontasi demokratik tersebut akan digantikan oleh konfrontasi baik berbagai nilai moral yang tidak dapat dinegosiasikan ataupun berbagai bentuk identifikasi esensialis.

PERSEMBAHAN

Dalam mengembangkan konsepsi saya tentang populisme kiri, saya berhutang pada berbagai diskusi publik dan percakapan privat dengan Íñigo Errejón, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin dan Yannis Stavrakakis, dengan cara-cara yang berbeda, mereka berkontribusi terhadap pengembangan argumen-argumen saya.

Saya sangat berterima kasih kepada Pauline Colonna D'istria, Leticia Sabsay, James Schneider dan Christophe Ventura atas berbagai saran dan komentarnya yang sangat membantu.

Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada Institute for Human Sciences in Vienna (IWM) karena telah menyediakan lingkungan yang menyenangkan selama berbulan-bulan, di musim semi 2017, ketika saya menulis bagian substansial dari naskah ini.

INDEKS

A
Aganakitsmenoi 24
Althusser, Louis 11
Amerika Latin 12
Amerika Serikat 102
Austria 23

B
Blair, Tony 4
Bloco de Esquerda 26
Bobbio, Norberto 64, 65
Boltanski, Luc 42

C
Chiapello, Eve 42
Corbyn, Jeremy 26, 47, 48
Crouch, Colin 16

D
Demokrasi Radikal 3
Die Linke 26

E
Eropa Timur 12

F
Freud, Sigmund 90
Front Nasional 23

Giddens, Anthony 4
Gramsci, Antonio 2

H
Habermas, Jürgen 18
Haider, Jörg 23
Hall, Stuart 5, 37
Hardt, Michael 66, 67
Harvey, David 63, 74
Hayek, Friedrich 38, 39
Huntington, Samuel 34

I
Indignados 24
Inggris 4, 26, 31, 32

Komisi Trilateral (1975) 34
London 31

J
Jaures, Jean 58
Jerman 26

K
Kazin, Michael 102

L
La France Insoumise 26, 84
Laclau, E. 1, 13, 34, 73
Le Bon, Gustave 78
Le Pen, Marine 28
Lefort, Claude 53
Lehman Brothers 15
Lordon, Frédéric 93, 94

M
Machiavelli 11, 12, 81
Macpherson 17, 38
Macron, Emmanuel 26
Mélenchon, Jean-Luc 26
Momentum 47

N
Negri, Antonio 67
New Deal (US) 102
Nuit Debout 24

O
Occupy 24

P
Partai Buruh 31
Partai Buruh Baru 4
Partai Kebebasan (FPÖ) 23
Partai Tories 31
People's Party (US) 102
Perang Dunia Ke-II 14
Podemos 25, 84, 105
Portugal 26
Prancis 23, 53

R
Rancière, Jacques 16, 53
Rorty, Richard 94
Ruffin, François 28, 119

S
Sanders, Bernie 102
Scargill, Arthur 36
Schmitt, Carl 17
Spanyol 24, 51

Spinoza, Baruch de 92
Stavrakakis, Yannis 93
Streeck, Wolfgang 32
Synaspismos 24
Syriza 24, 25

T
Thatcher 5, 34, 55, 82
Tocqueville, Alexis de 53

U
Uni Eropa 88
UKIP (United Kingdom Independence Party) 28

W
Wittgenstein, Ludwig 94

Y
Yunani 17

Produksi pengetahuan hari-hari ini nyaris selalu membutuhkan topangan (pe)modal. Tepat ketika produksi pengetahuan itu menyandarkan diri sepenuhnya pada modal, maka saat itulah juga terjadi produksi kekuasaan—yang pada akhirnya juga akan memproduksi ketidaksetaraan: ada orang yang mampu mengakses pengetahuan, juga ada yang tidak mampu mengaksesnya. **Antinomi Institute,** sebuah organisasi nonprofit yang membaktikan dirinya untuk pengembangan pengetahuan, ingin memutus ketergantungan produksi pengetahuan pada modal—yang watak primordialnya adalah selalu untuk melipatgandakan dirinya—dan juga ingin memastikan bahwa pengetahuan itu bisa dinikmati oleh semua orang.

Sejauh ini, Antinomi Institute telah melakukan produksi dan distribusi pengetahuan melalui dua bentuk: situs web dan buku. Semuanya dikerjakan dengan semangat untuk memproduksi pengetahuan, bukan untuk mengakumulasi kapital. Semua konten di situs web kami bisa diakses secara gratis, beberapa buku cetak dijual hanya untuk mengganti biaya produksi, selebihnya dibagikan secara gratis, dan semua buku elektronik *(ebook)* yang kami buat juga dibagikan secara gratis. Namun, untuk memastikan keberlanjutan itu semua, kami memerlukan keterlibatan Anda sebagai pembaca dan penikmat pengetahuan untuk memberikan bantuan dan dukungan material.

Sebagaimana moto "Sci-Hub", kami ada untuk *"removing barriers on the way of knowledge".*

Jika kalian merasa terbitan-terbitan Antinomi penting, kalian dapat membantu kami untuk tetap konsisten dalam memproduksi pengetahuan yang lebih inklusif melalui:

BCA: 521-1386-747 (Fajar Nurcahyo)
HSBC: 623-608643-844 (Fajar Nurcahyo)
DANA: 081294567235 (Fajar Nurcahyo)
OVO: 081294567235 (Fajar Nurcahyo)
LINKAJA: 081294567235 (Fajar Nurcahyo)

populisme kiri

Populisme Kiri *(For a Left Populism)* merupakan karya paling mutakhir dalam karir akademis Chantal Mouffe. Dalam buku ini Mouffe ingin menegaskan bahwa populis kiri sebagai pengusung nilai-nilai ideal dan visi progresif harus ikut turun dalam kontestasi demokratik sebelum demokrasi benar-benar dikuasai oleh populis kanan yang mengglorifikasi politik identitas melalui sentimen-sentimen rasial, keagamaan, kesukuan, xenofobik, intoleransi, dan lain sebagainya.

Buku ini merupakan terbitan pertama dari proyek **Urundana Antinomi.** Oleh karenanya terbitnya buku ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama donatur, baik dalam bentuk material maupun moral. Melalui buku ini kami berharap dapat membuka alternatif produksi pengetahuan yang melulu terpusat pada akumulasi kapital menjadi milik publik. Dengan demikian pengetahuan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang.

ANTINOMI
antinomi.org

URUNDANA
PROJECT

ISBN 978 602 51908 8 9
9 786025 190889